

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN
FINANCE YANG MENGGUNAKAN FASILITAS *CHANNELING*
(Analisis Kasus PT Dharmatama Megah Finance)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**LOVISA CLAUDYA
NIM. 145010100111109**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI****PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN
PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN *FINANCE* YANG
MENGUNAKAN FASILITAS *CHANNELING* (Analisis Kasus PT
Dharmatama Megah Finance)**

Lovisa Claudya
NIM. 145010100111109

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 7 Juni
2018 dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Amelia Sri Kusumadewi, S.H., M.Kn
NIP. 19811214 200801 2 001

Pembimbing Pendamping,

Shanti Rizkawati, S.H., M.Kn
NIP. 201201801216 2 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., Msi
NIP. 19620805 198802 1 001

Dr. Budi Santoso, SH., LL.M
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : LOVISA CLAUDYA

NIM : 145010100111109

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup untuk dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 25 Juni 2018

Yang Menyatakan,

LOVISA CLAUDYA
NIM. 145010100111109

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LLM selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
3. Ibu Amelia Sri Kusumadewi, S.H., MKn selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Shanti Rizkawati, S.H., MKn selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasinya.
5. Mama dan Papa yang selalu memberikan dukungan di dalam doa yang tidak pernah berhenti.
6. Jeje yang selalu mendukung supaya selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi saya.
7. Mas Andika dan Ce Lily yang selalu memberikan dukungan baik dalam menyediakan fasilitas dan data-data yang diperlukan dalam proses pengerjaan skripsi serta bantuan doa yang tiada henti-hentinya.
8. Teman-teman DOTS (Depend On The Savior) yang selalu mendoakan dan selalu bersedia mendengarkan keluh kesah selama menjalani proses ini.
9. Teman-teman Hot Ladies yang selalu bersedia membantu dan selalu memberikan semangat untuk terus maju.
10. Teman-teman Fidusia Squad yang selalu memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti-hentinya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Deifilii yang selalu berdoa dan memberikan dukungan yang tiada hentinya.
12. Clarina, Maulida dan Dwi yang selalu mendukung dan membantu ketika terdapat kesulitan
13. Seluruh teman-teman baik teman kampus dan teman gereja yang selalu mendukung dalam suka maupun duka sehingga penulis selalu bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, 25 Mei 2018

Lovisa Claudya



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Tentang Hukum Jaminan	14
B. Kajian Umum Tentang Jaminan Fidusia	19
C. Kajian Umum Tentang Perjanjian Channeling dan Joint Finance	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Metode Pendekatan	36
C. Jenis Bahan Hukum	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	40
F. Definisi Konseptual	42
BAB IV PEMBAHASAN	
1. Kasus Posisi PT Dharmatama Megah Finance	44
2. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen	46
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	110
2. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2. Hak-Kewajiban Bank X dan PT Dharmatama Megah Finance	53
Tabel 3. Hak-Kewajiban Debitur dan PT Dharmatama Megah Finance	59
Tabel 4. Hak-Kewajiban Pihak Bank X dan Konsumen Terdahulu	65
Tabel 5. Aturan-Aturan Perlindungan Preventif yang Belum dan Sudah Diatur Dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	79
Tabel 6. Aturan-Aturan Perlindungan Represif yang Belum dan Sudah Diatur Dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	109

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Skema Hubungan Hukum PT Dharmatama Megah Finance	47
---	----



RINGKASAN

Lovisa Claudya, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2018, PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN *FINANCE* YANG MENGGUNAKAN FASILITAS *CHANNELING* (ANALISIS KASUS PT DHARMATAMA MEGAH *FINANCE*), Amelia Sri Kusumadewi, S.H., MKn dan Shanti Rizkawati, S.H., MKn.

Dalam permasalahan hukum yang terjadi pada PT Dharmatama Megah Finance, pihak konsumen tidak dapat melakukan upaya hukum kepada PT Dharmatama Megah Finance karena tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika adanya permasalahan hukum yang terjadi. PT Dharmatama Megah Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang telah menggunakan fasilitas *channeling* dengan Bank X, namun fakta hukumnya PT Dharmatama Megah Finance tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan pihak Bank X.

Akibat perbuatannya, pihak Konsumen tidak dapat mengambil BPKB yang seharusnya sudah menjadi haknya karena pihak konsumen telah menyelesaikan kewajibannya dengan PT Dharmatama Megah Finance tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum kepada konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan perusahaan *finance* yang menggunakan fasilitas *channeling*.

Berdasarkan permasalahan hukum yang dikemukakan, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan untuk meneliti diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode interpretasi yuridis sehingga dapat menghasilkan penulisan secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

Maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Nomor 29/POJK.05/2014 belum memuat pasal-pasal yang mengatur secara detail tentang *channeling* tersebut. Maka perlindungan hukum yang dapat diberikan konsumen adalah perlindungan hukum preventif yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999, Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Perjanjian *Channeling* dan Perjanjian Pembiayaan. Perlindungan hukum yang juga dapat diberikan kepada konsumen adalah perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh dengan jalur non-litigasi dan jalur litigasi.

SUMMARY

Lovisa Claudya, Business Law, Faculty of Law Brawijaya University, May 2018,
LEGAL PROTECTION TO CONSUMERS IN CONSUMER FINANCING
AGREEMENTS WITH FINANCE COMPANY USING CHANNELING
FACILITY (The Case Analysis of PT Dharmatama Megah Finance) Amelia Sri
Kusumadewi, SH, MKn and Shanti Rizkawati, SH, MKn.

The legal feud happened between PT Dharmatama Megah Finance with their customers where the customers could not make any legal moves opposed to PT Dharmatama Megah Finance because there was no legal protection given to them. PT Dharmatama Megah Finance was a financing company that used 'channeling' facility with Bank X. It was found out that PT Dharmatama Megah Finance did not fulfill its obligation in accordance with what was agreed with Bank X.

Consequently, the Consumer could not get their certificate of ownership of their motor vehicles (BPKB) which acted as insurances that should had been returned to them when they had paid off their deeds to PT Dharmatama Megah Finance.

Based on the background mentioned above, the legal issue presented in this thesis was the legal protection to the consumer in the consumer financing agreement with the finance company using the 'channeling' facility.

Based on the legal issue presented, this normative legal research used legislation and analytical approach. The legal substance used to investigate was obtained through library research with juridical interpretation method to produce systematic writing in answering the legal formulated issues.

Through the discussion in this study, it was found that the Regulation of the Financial Services Authority on the Operation of Financing Company No. 29 / POJK.05 / 2014 had not contained the articles that regulated in detail about the channeling facility. Therefore, the legal protection that could be given to the consumer should had been preventive law protection in the Fiduciary Guaranty Act Number 42 of 1999, Minister of Finance Regulation concerning Financing Company No. 84 / PMK.012 / 2006, Regulation of the Financial Services Authority on Consumer Protection of Financial Services Sector Number 1 / POJK.07 / 2013, Channeling Agreement and Financing Agreement. Legal protection that also could had been given to the consumers was repressive legal protection which could be pursued by non-litigation and litigation channels.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan Fidusia telah dikenal dan digunakan oleh Bangsa Indonesia sudah sejak penjajahan Belanda dari Zaman Romawi. Hukum Romawi menyatakan bahwa lembaga fidusia dikenal dengan suatu istilah *fiducia cum creditore contracta* yang mempunyai arti yaitu janji kepercayaan yang telah dibuat oleh pihak kreditor. Perjanjian yang dibuat di antara pihak kreditor dan debitor adalah bahwa kepemilikan atas suatu badan akan dialihkannya kepada pihak debitor sebagai jaminan dari utang dengan suatu kesepakatan bahwa akan dikuasai secara fisik benda tersebut oleh pihak debitor dan dialihkan kembali kepemilikannya kepada pihak kreditor tersebut kepada debitor bilamana utangnya sudah dibayar lunas.¹

Arti fidusia itu sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie* yang artinya adalah kepercayaan dan fidusia itu sendiri lazim dikenal dengan istilah *eigendom overdracht (FEO)* yaitu adanya tindakan menyerahkan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.² Kata fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides* yang juga berarti kepercayaan. Yang dimaksudkan dengan kepercayaan itu adalah suatu penyerahan hak milik atas benda didasari suatu kepercayaan sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditor. Menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia (UUJF) pasal 1 ayat (1) Jaminan Fidusia tersebut menyebutkan:

¹ Rachmadi Usman, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 151.

² Salim, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2014 hlm. 55.

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.³

Dapat dirumuskan bahwa unsur-unsur fidusia tersebut adalah adanya pengalihan hak kepemilikan, dilakukan dengan dasar kepercayaan, dan bendanya tetap di dalam penguasaan pemilik benda. Tindakan mengalihkan hak kepemilikan adalah memindahkan hak kepemilikan dari si pemberi fidusia kepada si penerima fidusia yang mendasari adalah sebuah kepercayaan dan objeknya akan tetap berada di tangan si pemilik objek tersebut. Adapun objek yang diatur pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia (UUJF) tersebut adalah benda yang bergerak, dengan klasifikasi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak, termasuk bangunan yang tidak dibebani tanggungan.

Perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, perkembangan ekonomi yang melaju pesat, serta perkembangan perkreditan semakin berkembang di masyarakat mendorong adanya bentuk jaminan-jaminan baru dimana orang-orang tersebut dapat memperoleh kredit dan dapat menikmati obyek benda bergerak tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari. Dari kebutuhan tersebut maka muncullah lembaga jaminan fidusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Penjaminan melalui lembaga fidusia tersebut mendapatkan tanggapan yang baik di masyarakat. Hal tersebut tercermin pada keuntungan yang tengah dirasakan masyarakat baik pihak debitor maupun pihak kreditor. Keuntungan yang dirasakan pihak debitor adalah melalui fidusia kebutuhan akan kredit akan tercapai dan masih dapat menguasai serta menikmati benda jaminannya untuk kegiatan sehari-hari. Sedangkan keuntungan yang

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

dirasakan pihak kreditor adalah prosedur yang lebih sederhana serta ikatan dari fidusia tersebut tidak menginsyaratkan adanya penyerahan obyek jaminan sehingga tidak memerlukan tempat khusus untuk menyimpan obyek-obyek jaminannya.

Pembebanan jaminan fidusia itu sendiri telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia (UUJF). Sifat dari jaminan fidusia itu sendiri telah tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 (UUJF), yaitu:

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.⁴

Dari ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 (UUJF), jaminan fidusia bersifat perjanjian ikutan atau *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sehingga suatu kewajiban dapat timbul bagi pihak-pihak untuk pemenuhan suatu kewajiban atau suatu prestasi. Perjanjian ikutan atau *accessoir* tersebut harus didahului dengan adanya perjanjian pokok yang dibuat. Apabila perjanjian pokok berakhir, otomatis perjanjian ikutan atau *accessoir* pun harus diakhiri. Begitu juga dengan pembatalan perjanjian pokok yang dibatalkan, maka perjanjian ikutan atau *accessoir* tersebut pun harus ikut dibatalkan juga. Hal tersebut menjelaskan bahwa jaminan fidusia tersebut bukan perjanjian pokok yang harus dan wajib untuk diadakan namun perjanjian tersebut dapat diadakan dan dapat juga tidak diadakan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF), pengikatan perjanjian terhadap suatu benda dituangkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (UUJF), yang berbunyi: Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan

⁴ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia.⁵ Dari ketentuan pasal tersebut, Jaminan Fidusia akan membebani benda-benda yang terikat dengan jaminan fidusia itu sendiri. Mengingat pada sifat dari jaminan fidusia itu sendiri yang merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir*, maka jaminan fidusia tersebut memiliki sifat sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat yang bergantung terhadap perjanjian pokoknya.
2. Sahnya suatu perjanjian pokok tersebut menentukan tingkat keabsahan dari perjanjian itu.
3. Perjanjian tersebut dapat dilaksanakan apabila telah melaksanakan atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pokok karena memiliki sifat yaitu perjanjian yang bersyarat.

Sifat dari Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan perjanjian pokok bersifat mandiri melainkan jaminan fidusia ini hanya mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga konsekuensi yang dilahirkan dari sifat jaminan fidusia tersebut apabila tidak terdapat perjanjian pokok yang diadakan terlebih dahulu adalah perjanjian yang dibuat tidak menimbulkan suatu kewajiban dan apabila debitur melakukan wanprestasi maka hak eksekutorial yang telah dimiliki oleh Pemegang Hak Jaminan Fidusia seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) tidak dapat dilaksanakan oleh kreditur.

Objek jaminan Fidusia adalah suatu benda yang dibatasi oleh Pasal yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek.⁶

⁵ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁶ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Sehingga dari Pasal 1 ayat (4) tersebut dapat dirumuskan bahwa objek Jaminan Fidusia tersebut meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak tertentu yang Hak Tanggungan dan Hipotek tidak dapat membebani benda-benda tersebut dengan ketentuan benda tersebut dapat dimiliki dan dialihkan. Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) menyebutkan sifat Jaminan Fidusia bahwa Jaminan Fidusia tersebut dapat dialihkan, yaitu:

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.⁷

Dari pasal 19 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa Jaminan Fidusia sangat sah apabila nantinya akan dipindahalihkan kepada pihak lain dengan segala hak serta kewajiban yang telah disepakati terlebih dahulu. Dari pernyataan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF), pihak-pihak yang terlibat juga harus memperhatikan pernyataan pada Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) yang menyatakan bahwa: “Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.”⁸

Dalam praktik perjanjian Jaminan Fidusia, tidak lepas dengan adanya permasalahan hukum dalam pengimplikasian Jaminan Fidusia tersebut. Permasalahan tersebut terjadi pada salah satu perusahaan pembiayaan yaitu PT Dharmatama Megah Finance. PT Dharmatama Megah Finance telah melakukan perjanjian kerjasama dengan bank dalam hal pendanaan atau peminjaman namun pihak PT Dharmatama Megah Finance tidak mampu melunasi kewajibannya

⁷ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁸ Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

kepada pihak bank dan berdampak buruk terhadap konsumen dari PT Dharmatama Megah Finance. Sebagai Pihak Finance, PT Dharmatama Megah Finance dapat melakukan peminjaman dari pihak bank. Hal tersebut telah dilakukan oleh PT Dharmatama Megah Finance karena telah tercantum pada Pasal 25 ayat (1) PMK No. 84/PMK.012/2006 yang berbunyi: Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.⁹

Dari Pasal 25 ayat (1) PMK No. 84/PMK.012/2006 mengisyaratkan bahwa sebuah Perusahaan Pembiayaan dapat menerima sebuah pinjaman dari bank dan PT Dharmatama Megah Finance melakukan sebuah kerjasama tersebut dengan cara Pembiayaan *Channeling* dan Pembiayaan Bersama atau *Joint Financing*. Pembiayaan *Channeling* merupakan bentuk kerjasama dengan pihak bank yang mana keseluruhan risikonya berada di pihak yang memiliki dana yaitu adalah bank. Pembiayaan Bersama atau *Joint Financing* merupakan bentuk kerjasama yang mana risiko tersebut mempunyai beban masing-masing untuk para pihak secara proposional. Ketentuan tersebut di dalam Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK) yang menjelaskan risiko yang timbul dari kedua pembiayaan tersebut. Begitu juga dalam hal melakukan Pembiayaan *Channeling* dan Pembiayaan *Joint Financing* atau Pembiayaan Bersama, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PMK No. 84/PMK.012/2006, yang berbunyi:

⁹ Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat bekerjasama dengan Bank Umum melalui Pembiayaan *Channeling* atau Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*).¹⁰

Berawal dari salah satu nasabah PT Dharmatama Megah Finance yang hendak mengambil BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil yang telah dibelinya melalui PT Dharmatama Megah Finance dan telah lunas dibayar namun pihak PT Dharmatama Megah Finance menolak dan tidak memberikan BPKB mobil pemilik nasabah yang telah menyelesaikan kewajibannya. Setelah diperiksa ternyata BPKB yang seharusnya sudah dapat dimiliki oleh pihak nasabah tersebut ternyata dijaminkan kepada pihak Bank oleh PT Dharmatama Megah Finance.

Pada awal penandatanganan perjanjian fidusia, banyak nasabah dari PT Dharmatama Megah Finance yang tidak menyadari bahwa di dalam pasal-pasal perjanjian yang telah diperjanjikan memuat pasal yang menyatakan bahwa pihak *finance* dapat mengalihkan Jaminan Fidusia tersebut kepada pihak ketiga yang mana adalah bank tanpa meminta persetujuan kembali kepada konsumen. Para nasabah hanya menyadari bahwa mereka hanya mengikatkan diri hanya kepada pihak *finance* tersebut dan bukan pada pihak bank. Pada suatu hal, PT Dharmatama Megah Finance terjadi kemacetan pembayaran atau mengalami gagal bayar ke pihak bank. Di lain sisi, konsumen PT Dharmatama Megah Finance secara lancar membayar kepada pihak PT Dharmatama Megah Finance. Pada tahap pelunasan, konsumen dari PT Dharmatama Megah Finance tersebut meminta BPKB mobil karena telah terjadi pelunasan tersebut. Namun, ketika meminta BPKB tersebut, pihak PT Dharmatama Megah Finance tersebut tidak dapat memberikan BPKB yang sudah seharusnya menjadi milik konsumen tersebut karena BPKB milik

¹⁰ Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

konsumen diserahkan kepada pihak bank oleh PT Dharmatama Megah Finance sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan fasilitas *channeling*.

Sepanjang konsumen tersebut memenuhi prestasinya dalam melakukan pembayaran cicilan tersebut, maka pihak PT Dharmatama Megah Finance tidak mempunyai alasan untuk mengeksekusi jaminan fidusia yang telah dipegangnya. Di samping itu, PT Dharmatama Megah Finance mempunyai kewajiban untuk menyerahkan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada konsumen yang telah melunasi pembayarannya atau kewajibannya. Namun, BPKB milik konsumen tersebut telah dijaminkan kepada pihak bank oleh PT Dharmatama Megah Finance untuk mendapatkan fasilitas *channeling* tidak dapat diambil karena terjadi kemacetan pembayaran oleh PT Dharmatama Megah Finance. Kesalahan dari PT Dharmatama Megah Finance adalah ia tidak dapat melunasi kewajibannya kepada pihak bank sehingga BPKB yang sudah seharusnya dimiliki oleh konsumen tidak dapat diambil oleh PT Dharmatama Megah Finance.

Dari permasalahan hukum yang terjadi antara PT Dharmatama Megah Finance dengan pihak konsumennya begitu juga dengan dengan pihak bank dapat dikatakan bahwa adanya kekosongan norma hukum yang mana peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut belum ada peraturan yang mengatur sehingga tidak dapat mengatasi permasalahan hukum yang terjadi secara detail dan mendalam dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen dengan pihak *finance* yang menggunakan fasilitas *channeling*. Pada penelitian ini, Penulis akan meneliti perlindungan hukum terhadap konsumen dari permasalahan hukum PT Dharmatama Megah Finance. Penulis menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang

Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK) dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (PERMENKEU) sebagai pedoman dalam menentukan peraturan yang seharusnya digunakan dalam mengatur perlindungan hukum kepada konsumen beserta dengan solusi dan saran yang perlu dilakukan untuk memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan permasalahan hukum yang serupa.

Dengan persoalan yang telah penulis jabarkan di atas yang pada kenyataan masih saja menjadi kerancuan setiap masyarakat dan Perusahaan Pembiayaan dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen, maka Penulis merasa bahwa adanya kekosongan norma hukum yang terdapat di permasalahan yang hendak diangkat, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian melalui penulisan ilmiah ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PERUSAHAAN *FINANCE* YANG MENGGUNAKAN FASILITAS *CHANNELING* (Analisis kasus PT Dharmatama Megah Finance)”**

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

No	Identitas Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Teddy Anggoro	ANALISIS KEDUDUKAN BANK, LESSEE, DAN STATUS JAMINAN FIDUSIA DALAM PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN	1. Bagaimana Kedudukan Bank sebagai kreditor dalam Kerjasama Pembiayaan dan Lessee sebagai Pemberi Fidusia Dalam Perjanjian	Tesis pada penelitian sebelumnya membahas tentang kedudukan masing-masing pihak, yaitu bank sebagai kreditor dan lessee sebagai pemberi fidusia yang

		PEMBAYARAN UTANG PT DHARMATAMA MEGAH FINANCE	<p><i>leasing</i> terkait dengan PKPU PT Dharmatama Megah Finance?</p> <p>2. Bagaimana status Jaminan Fidusia dalam proses PKPU ?</p>	<p>dikaitkan dengan PKPU PT Dharmatama Megah Finance serta penelitian tesis tersebut juga meneliti tentang status dari Jaminan Fidusia tersebut selama dalam proses PKPU PT Dharmatama Megah Finance. Perbedaan yang terdapat dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang hendak Penulis teliti adalah Peneliti akan membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dari perusahaan pembiayaan yang menggunakan fasilitas <i>channeling</i> dengan menganalisis kasus dari PT Dharmatama Megah Finance.</p>
--	--	--	---	---

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang hendak Penulis angkat berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut adalah bagaimana perlindungan hukum kepada konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan perusahaan *Finance* yang menggunakan fasilitas *Channeling*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari permasalahan yang telah dijabarkan adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan mengkritisi terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan perusahaan pembiayaan atau finance yang menggunakan fasilitas channeling berdasarkan analisis kasus PT Dharmatama Megah Finance sehingga dapat memberikan suatu pendapat terhadap perlindungan hukum yang sebagaimana seharusnya diterima oleh konsumen yang mengalami permasalahan hukum yang dialami oleh PT Dharmatama Megah Finance tersebut.

D. Manfaat Penelitian

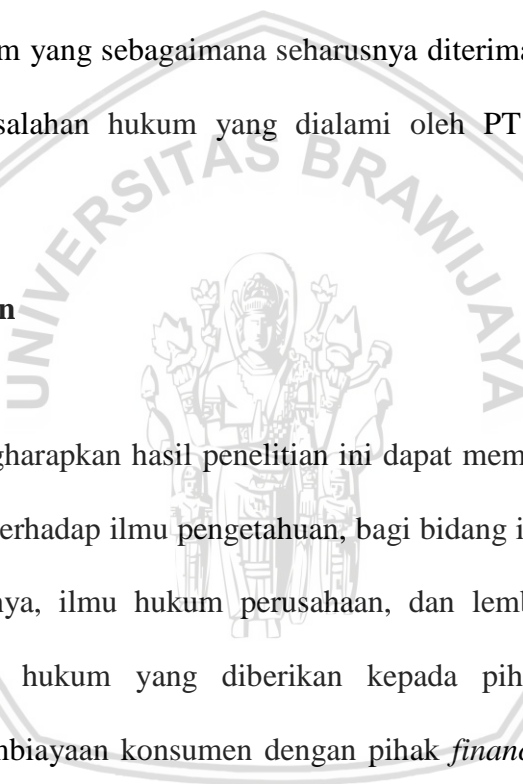
1. Secara Teoritis

- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan, bagi bidang ilmu hukum bisnis dan pada umumnya, ilmu hukum perusahaan, dan lembaga fidusia terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pihak *finance* yang menggunakan fasilitas *channeling* seperti pada permasalahan hukum yang dialami oleh PT Dharmatama Megah Finance.
- b. Sebagai masukan dan informasi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa dan Akademisi

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan literatur dan menambah pengetahuan baru yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun



peneliti-peneliti yang memiliki ketertarikan dalam studi keilmuan mengenai hukum jaminan, khususnya mengenai jaminan fidusia.

b. Bagi Lembaga Fidusia

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberi pedoman bagi para pelaku/anggota dalam menjalankan ketentuan dalam hal pemberian perlindungan hukum kepada konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pihak *finance* yang menggunakan fasilitas *channeling*.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan acuan dari masyarakat untuk lebih memahami mengenai perlindungan hukum yang diterima kepada masyarakat dalam hal pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen dengan pihak perusahaan pembiayaan atau pihak *finance* maupun dengan pihak bank.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah yang menjadi pokok kajian pembahasan, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pustaka yang berisi tentang teori-teori mengenai kajian umum tentang hukum jaminan dan kajian umum tentang jaminan fidusia.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut: Pendekatan Perundang-Undangann

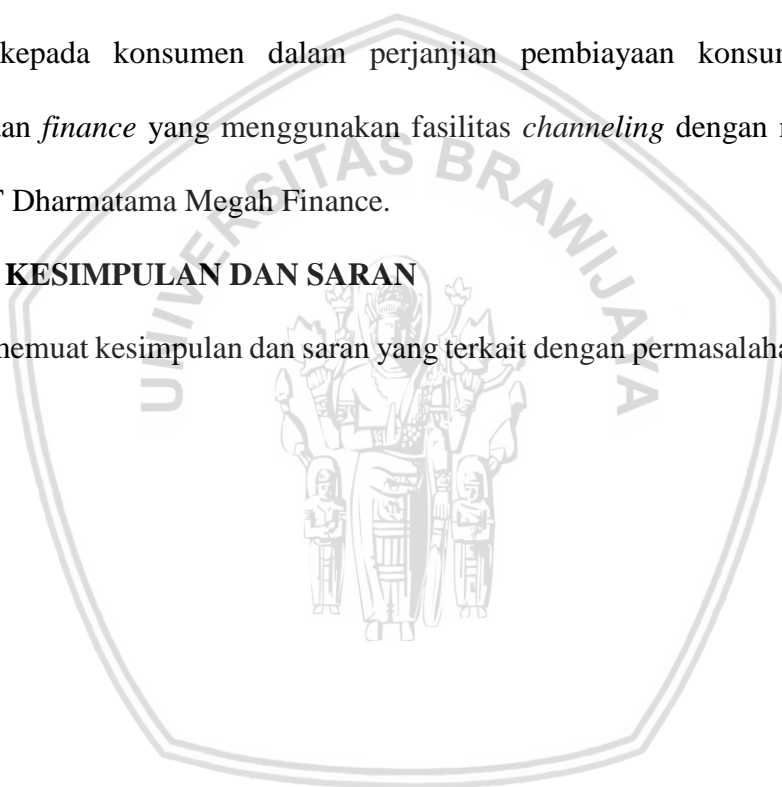
(*Statute Approach*) dan Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan berguna untuk mendapatkan sumber data yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan serta bahan penelitian yang diperoleh.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan yang berisi tentang analisis mengenai perlindungan hukum kepada konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan perusahaan *finance* yang menggunakan fasilitas *channeling* dengan menganalisis kasus PT Dharmatama Megah Finance.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Hukum Jaminan

1. Pengertian Hukum Jaminan

Menurut **Sri Soedewi Masjhoen Sofwan**, pengertian hukum jaminan adalah “pengaturan konstruksi yuridis yang dimungkinkan adanya pemberian fasilitas kredit, dengan membeli benda-benda yang menjadi benda jaminan. Peraturan tersebut harus cukup meyakinkan dan adanya suatu kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, seharusnya diikuti dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.”¹ Dari pendapat yang oleh **Sri Soedewi Masjhoen Sofwan** menyatakan, hal tersebut merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan menyusun suatu peraturan perundang-undangan tentang jaminan untuk masa yang akan mendatang. Sehingga **J. Satrio** mengemukakan pengertian hukum jaminan adalah: Jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur yang diatur dalam peraturan hukum.²

Menurut **J. Satrio** hanya mengatur hak-hak kreditur saja dan tidak memperhatikan hak-hak dari debitur. Dari definisi-definisi yang telah

¹ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, **Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan**, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1980, hlm. 5

² Satrio J., **Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1986, hlm. 3

dikemukakan perlu dilengkapi dan disempurnakan menjadi hukum jaminan adalah:

Seluruh kaidah-kaidah hukum yang adanya pengaturan tentang hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.³

Unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tersebut adalah:

a. Adanya peraturan hukum

Kaidah hukum dalam bidang jaminan dibedakan menjadi dua macam yaitu, tentang peraturan hukum jaminan tertulis dan peraturan hukum jaminan tidak tertulis. Peraturan hukum jaminan tertulis adalah peraturan-peraturan hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, sedangkan peraturan hukum jaminan tidak tertulis adalah peraturan-peraturan hukum jaminan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat.

b. Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan. Fasilitas kredit dibutuhkan oleh seorang pemberi jaminan atau seorang debitur yang mana adalah perorangan atau suatu badan hukum. Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan.

c. Adanya jaminan

³ Dr. H. Salim H.S., S.H., M.S., **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 6

Jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan.

d. Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Menurut **M. Bahsan** jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.⁴

2. Sifat Perjanjian Jaminan

Perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, perjanjian pokok dan perjanjian aksesoir. Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit bank. “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁵ Unsur-Unsur yang terdapat di definisi kredit, meliputi:

- a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu;
- b. didasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;

⁴ *Ibid*, hal. 21.

⁵ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- c. para pihaknya, yaitu bank dan pihak lain (nasabah);
- d. kewajiban peminjam, yaitu untuk melunasi hutangnya;
- e. jangka waktu; dan
- f. adanya bunga.

Perjanjian aksesoir adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh dari perjanjian aksesoir ini adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Sehingga sifat dari perjanjian jaminan adalah perjanjian aksesoir, yaitu mengikuti perjanjian pokok.⁶

3. Jenis Jaminan

Jenis Jaminan di Indonesia adalah Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan. Menurut **Sri Soedewi Mascijhoen Sofwan** pengertian jaminan kebendaan dan jaminan perorangan adalah Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri memiliki hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya, dapat dialihkan. Sedangkan jaminan perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan langsung pada perorangan tertentu hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu adalah sebagai berikut:

- a. Gadai;
- b. hipotek;

⁶ Dr. H. Salim H.S., **Op.cit**, hal.29.

- c. *credietverband*;
- d. hak tanggungan;
- e. jaminan fidusia.

Sedangkan yang termasuk dalam jaminan perorangan adalah sebagai berikut:

- a. Penanggung (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih.
- b. Tanggung menanggung yang merupakan keserupaan dengan tanggung renteng.
- c. Perjanjian garansi.

4. Penggolongan Jaminan

Lembaga Jaminan diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan:

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pernyataan dari Pasal 1131 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa lembaga jaminan tersebut mempunyai jenis lembaga jaminan yang berbeda yaitu lembaga jaminan yang mengatur objek jaminan yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta objek jaminan yang berada dalam kekuasaan penerima jaminan dan yang tidak dalam penguasaan penerima jaminan.

Lembaga-lembaga jaminan yang telah diatur dan berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. *Hipotek* diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;

- b. *Hak Tanggungan* diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- c. *Jaminan Fidusia* diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d. *Gadai* diatur dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata.

Dalam penggolongan jaminan tersebut mempunyai tujuan untuk mempermudah debitur dalam membebani hak-hak yang akan digunakan dalam pemasangan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit pada lembaga perbankan atau penggadaian.

B. Kajian Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam hukum romawi lembaga fidusia tersebut dikenal dengan *fiducia cum creditore contracta*. Pada dasarnya, lembaga *fiducia cum amino* sama dengan lembaga *trust* sebagaimana dikenal dalam sistem hukum Anglo-Amerika atau common law.⁷ Pengertian dari Fidusia tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁸

Dalam pengertian tersebut yang dimaksud dengan pengalihan hak kepemilikan adalah adanya proses pemindahan hak kepemilikan dari pemberi

⁷ Usman Rachmadi, **op.cit.**, hal. 150.

⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

fidusia kepada penerima fidusia dengan dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Selain dari pengertian fidusia itu sendiri terdapat istilah jaminan fidusia yang terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu:

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁹

Unsur-unsur jaminan fidusia itu sendiri adalah:

- a. adanya hak jaminan;
- b. terdapat objek, yaitu benda yang bergerak baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya untuk bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- c. benda menjadi objek dari jaminan tersebut akan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia;
- d. memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.

Dari unsur-unsur yang terdapat dalam jaminan fidusia itu sendiri dapat diketahui bahwa jaminan fidusia mempunyai beberapa sifat sebagai berikut:

- a. Perjanjian Fidusia merupakan Perjanjian Obligatoir

⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia merupakan lembaga hak jaminan yang bersifat kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pihak penerima fidusia terhadap kreditor lainnya sehingga hak kebendaan melekat pada jaminan fidusia. Hal tersebut juga diungkapkan oleh **Sri Soedewi Masjchoen Sofwan** adalah sebagai berikut:

Perjanjian fidusia bersifat *obligatoir*, berarti hak yang penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, meskipun hak tersebut dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dalam perjanjian. Akan tetapi, pembatasan demikian hanya bersifat pribadi. Karena hak yang diperoleh penerima fidusia itu merupakan hak milik yang sepenuhnya, ia bebas untuk menentukan cara pemenuhan piutangnya, terhadap benda yang dijaminakan melalui fidusia. Hak yang timbul dari perjanjian fidusia adalah hak yang bersifat pribadi, yang lahir karena adanya hubungan perutangan antara kreditor dan debitur. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dari gadai tidak dapat diterapkan terhadapnya. Juga para pihak bebas untuk menentukan manakala terjadi kepailitan pada debitur atau kreditor.¹⁰

b. Sifat *Accessoir* dari Perjanjian Jaminan Fidusia

Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut digunakan sebagai agunan bagi pelunasan hutang debiur sehingga perjanjian Jaminan Fidusia tersebut merupakan suatu perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokoknya. **J. Satrio** berpendapat sebagai berikut:

Karena perjanjian fidusianya merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sesuai dengan sifatnya tersebut, perjanjian pemberian Jaminan Fidusia merupakan suatu perjanjian bersyarat, dengan syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 *juncto* Pasal 1265 KUH Perdata, dengan konsekuensinya, pemberian

¹⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, **Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktik dan Pelaksanaan di Indonesia**, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977, hlm. 23.

Jaminan Fidusia itu dengan sendirinya berakhir atau hapus, antara lain karena pelunasan.¹¹

Dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh **J. Satrio** apabila perjanjian pokoknya telah berakhir, seperti dengan adanya pelunasan tersebut maka perjanjian ikutannya secara otomatis akan ikut berakhir.

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Dasar hukum berlakunya fidusia dapat disajikan berikut ini.

- a. *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (negeri Belanda);
- b. *Arrest Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest* (Indonesia); dan
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Konsideran dari Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan.
- b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
- c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta

¹¹ J. Satrio, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 197.

mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam huruf a, b dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Penjelasan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- a. Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
- b. Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 bab dan 41 pasal.

Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini, meliputi:

- a. Ketentuan Umum (Pasal 1)

Mengatur tentang pengertian fidusia, jaminan fidusia, piutang, benda, pemberi fidusia, penerima fidusia, utang, kreditur, debitur, dan orang.

- b. Ruang Lingkup (Pasal 2 sampai dengan Pasal 3)

Undang-undang tersebut berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tidak berlaku terhadap:

- i. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda tersebut wajib didaftarkan.
- ii. Hipotek atas kapal laut yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 m³ atau lebih.
- iii. Hipotek atas pesawat terbang.
- iv. Gadai (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).
- c. Pembebanan, pendaftaran, pengalihan, dan hapusnya jaminan fidusia (Pasal 4 sampai dengan Pasal 26)
- d. Hak mendahului (Pasal 27 sampai dengan Pasal 28)
- e. Eksekusi jaminan fidusia (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34)
- f. Ketentuan pidana (Pasal 35 sampai dengan Pasal 36)
- g. Ketentuan peralihan (Pasal 37 sampai dengan Pasal 38)
- h. Ketentuan penutup (Pasal 39 sampai dengan 41)

Ketentuan peralihan mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembebanan benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- b. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak berdirinya kantor pendaftaran fidusia, semua perjanjian jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Ketentuan penutup berisi sebuah perintah kepada Pemerintah supaya dapat dibentuk Kantor Pendaftaran Fidusia pada tingkat provinsi. Jangka waktunya paling lambat 1 tahun setelah undang-undang ini.

3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia dibagi dua macam, yaitu:¹²

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan berkaitan dengan bangunan rumah susun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Subjek dari jaminan fidusia tersebut adalah pihak pemberi fidusia dan pihak penerima fidusia. Pihak Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan pihak penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

4. Pengalihan hak Jaminan Fidusia

Pengalihan Hak Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

¹² Dr. H. Salim H.S., S.H., M.S., *Op.cit*, hal. 64

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.

Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999, pengalihan hak atas piutang tersebut secara hukum beralihnya segala hak dan kewajiban dari Penerima Fidusia yang lama kepada Penerima Fidusia yang baru yang telah menerima pengalihan hak atas piutang tersebut. Tindakan mengalihkan hak atas piutang sesuai dengan penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dikenal dengan istilah *cessie* yang berarti pengalihan piutang tersebut dilakukan dengan akta otentik atau dapat juga dilakukan dengan akta di bawah tangan.

Beralihnya Jaminan Fidusia tersebut terjadi secara hukum maka dari itu tidak diperlukan adanya pembuktian dengan membuat Akta Jaminan Fidusia yang baru. Jaminan Fidusia tersebut dilakukan berdasarkan alat yang membuktikan telah beralihnya hak atas piutang yang dijamin kepada kreditor baru.¹³

C. Kajian Umum tentang Perjanjian Channeling dan Joint Finance

Pembuatan suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah suatu perjanjian itu sendiri. Syarat sah suatu perjanjian tersebut tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan¹⁴:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

¹³ Rachamadi Usman, **op.cit.**, hal. 218

¹⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketika perjanjian itu dibuat, maka suatu perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Dalam hal kesepakatan kedua belah pihak maka terbentuklah suatu kata sepakat dan semua pihak yang terkait telah menyetujui mengenai hal-hal yang telah diperjanjikan sehingga dalam syarat kesepakatan tersebut tidak diperkenankan adanya unsur paksaan dan penipuan. Kesepakatan dianggap tidak sah jika terdapat unsur¹⁵:

a. Kekhilafan/*dwaling* (1322 KUH Perdata)

Kekhilafan terjadi pada saat seseorang membuat perjanjian di bawah pengaruh pandangan yang kurang tepat dan tidak baik. Apabila salah satu pihak keliru dengan apa yang diperjanjikan dan di satu sisi pihak yang lain membiarkan kekeliruan tersebut maka juga dapat disebut sebagai suatu kekhilafan.

b. Paksaan/*dwang* (1323 KUH Perdata)

Sebuah paksaan yang dilakukan seseorang dapat berupa ancaman sehingga dapat berdampak pada pembatalan suatu perjanjian yang dilakukan terhadap orang yang membuat perjanjian.

c. Penipuan/*bedrog*

Penipuan merupakan suatu tindakan tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain menyepakati perjanjian tersebut dan menandatangani. Ada beberapa macam bentuk penipuan, yaitu:

i. Penipuan disengaja (*Intentional Misrepresentation*)

ii. Penipuan karena kelalaian (*Negligent misrepresentation*)

¹⁵ Ratna Artha Windari, **Hukum Perjanjian**, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014, hlm. 16.

- iii. Penipuan tanpa kesalahan (*Innocent Misrepresentation*)
- iv. Penipuan dengan jalan merahasiakan (*Concealment*)
- v. Penipuan menutupi informasi (*Nondisclosure*)

Apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian itu dapat dibatalkan.

Kecapakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum sangat memengaruhi dalam pembuatan suatu perjanjian. Menurut ketentuan dalam KUH Perdata, seseorang yang telah dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah seseorang yang telah dinyatakan dewasa menurut hukum yaitu telah berusia 21 tahun. Unsur kecakapan seseorang ini merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian dan apabila tidak memenuhi unsur ini maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Dalam perjanjian yang akan dibuat, perjanjian tersebut harus memuat objek yang diperjanjikan dengan sangat jelas dan ditentukan oleh para pihak. Apabila unsur tersebut dipenuhi maka konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum. Keabsahan suatu perjanjian tersebut juga ditentukan oleh kausa yang halal sehingga apabila tanpa kausa yang halal maka suatu perjanjian tersebut batal demi hukum.

Sebuah Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman dari pihak bank yang berdasarkan perjanjian pinjam meminjam tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut “Perusahaan Pembiayaan dapat menerima pinjaman dari bank dan/atau badan usaha lainnya

berdasarkan perjanjian pinjam meminjam.”¹⁶ Dari penjelasan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2016 tentang Perusahaan Pembiayaan, tidak semua perusahaan pembiayaan dapat mengajukan pinjaman dari bank. Perusahaan pembiayaan tersebut harus memenuhi kriteria dalam pengajuan pinjaman yang akan diberikan oleh bank. Ketentuan-ketentuan atau kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan telah tertera dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yaitu sebagai berikut¹⁷:

Pinjaman dari badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan Pembiayaan dinilai oleh lembaga independen yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - 1) latar belakang perusahaan dan keadaan keuangan;
 - 2) kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - 3) manajemen risiko;
 - 4) kemampuan memperoleh laba secara berkesinambungan;
- b. Jumlah pinjaman selain bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap investor dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun;

Dalam menerima bantuan dana dari bank, suatu Perusahaan Pembiayaan akan menjalin dan melakukan hubungan kerjasama dengan pihak bank dengan melakukan Pembiayaan *Channeling* atau Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*). Pernyataan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

¹⁷ Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat bekerjasama dengan Bank Umum melalui Pembiayaan *Channeling* atau Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*).¹⁸

Pengaturan tentang kerjasama dalam hal kerjasama pembiayaan dengan pihak bank dengan cara Pembiayaan *Channeling* dan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) juga diatur di Pasal 42 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan:

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pembiayaan dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*Channeling*) atau pembiayaan bersama (*Joint Financing*) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Perusahaan Pembiayaan tersebut dapat melakukan kerjasama pembiayaan dengan pihak lain. Yang dimaksud dengan pihak lain tersebut adalah bank, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, lembaga keuangan mikro dan perusahaan pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Nomor 29/POJK.05/2014, yang menyatakan:

Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bank;
- b. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
- c. lembaga keuangan mikro; dan/atau
- d. Perusahaan Pembiayaan²⁰

¹⁸ Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

¹⁹ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

²⁰ Pasal 42 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Berikut merupakan kajian hukum tentang bentuk kerjasama pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan pihak bank dalam hal pendanaan, yaitu Pembiayaan *Channeling* dan Pembiayaan *Joint Financing*.

1. Kajian Hukum tentang Pembiayaan *Channeling*

Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain antara lain dengan pihak bank dengan menggunakan kerjasama *channeling*. Kerjasama *channeling* tersebut dapat disebut juga dengan pembiayaan penerusan.

Bentuk kerjasama *Channeling* yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan yang menggunakan Pembiayaan *Channeling* ini, merupakan kerjasama yang menjadi sumber utama bagi Perusahaan Pembiayaan. Maksud dari pernyataan tersebut adalah seluruh pendanaan berasal dari pihak bank yang ditujukan kepada pihak Perusahaan Pembiayaan. Karena seluruh dana berasal dari pihak bank, maka seluruh risiko berada di pihak Bank Umum tersebut. Pernyataan tersebut terdapat di Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

Dalam pembiayaan *Channeling* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh dana untuk pembiayaan berasal dari bank umum dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada bank umum.²¹

Otoritas Jasa Keuangan pun juga mengatur tentang risiko yang ditimbulkan dari fasilitas *channeling* tersebut. Hal tersebut dinyatakan di dalam pasal 42 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

²¹ Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

Dalam pembiayaan penerusan (*channeling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada pihak yang memiliki dana.²²

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa risiko yang timbul sepenuhnya berada di pihak yang memiliki dana yang mana dalam hal ini adalah pihak bank.

Dalam hal kerjasama *channeling* tersebut, pihak Perusahaan Pembiayaan yang merupakan pihak yang menerima dana, hanya bertindak atau hanya berperan sebagai pengelola saja. Perusahaan Pembiayaan tersebut akan mendapatkan imbalan dalam mengelola dana tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengatur hal tersebut dalam Pasal 42 ayat (4), yang menyatakan:

Dalam pembiayaan penerusan (*channeling*), pihak yang menerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan atau *fee* dari pengelolaan dana tersebut.²³

2. Kajian Hukum tentang Pembiayaan *Joint Financing*

Perusahaan Pembiayaan dalam melakukan usahanya dapat melakukan kerjasama pembiayaan. Salah satu bentuk kerjasama pembiayaan tersebut melalui pembiayaan *joint financing*. Pembiayaan *Joint Financing* yang

²² Pasal 42 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

²³ Pasal 42 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan tersebut disebut juga dengan Pembiayaan bersama.

Dalam hal sumber pendanaan, Perusahaan Pembiayaan mendapat sumber pendanaan yang sebagian berasal dari Bank Umum dan selebihnya merupakan dana berasal dari Perusahaan Pembiayaan sehingga tidak seluruhnya merupakan dana dari pihak Bank Umum, pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

Dalam Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana untuk pembiayaan ini berasal dari Perusahaan Pembiayaan dan Bank Umum.²⁴

Begitu pun dengan Otoritas Jasa Keuangan, OJK juga mengatur tentang risiko yang akan timbul pada Pembiayaan Bersama atau *Joint Finance*. Dalam Pasal 42 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan sebagai berikut:

Risiko yang timbul dari pembiayaan bersama (*joint financing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional sesuai dengan besaran dana yang yang dikeluarkan.²⁵

Kerjasama yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan pihak lain tersebut dapat berbentuk pembiayaan penerusan atau yang

²⁴ Pasal 27 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

²⁵ Pasal 42 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

disebut dengan pembiayaan *channeling* dan dapat berbentuk pembiayaan bersama atau yang disebut dengan *joint financing*.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis adalah dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penelitian normatif adalah suatu penelitian di bidang hukum untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.¹

Penulis dalam meneliti penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif karena dalam proses meneliti penulis mengumpulkan peraturan-peraturan yang terkait dengan cara mencari, menganalisis kasus, serta mengelompokkan peraturan-peraturan yang mempunyai hubungan dengan penelitian tersebut. Dari peraturan-peraturan yang telah dikumpulkan dan yang telah dianalisis, Penulis menggunakan metode induktif dimana Penulis akan menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat khusus menjadi umum sehingga dari penerapan hukum yang berlaku untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen PT Dharmatama Megah Finance dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum yang telah berlaku di Indonesia.

Peraturan-peraturan yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 beserta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 35.

29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dimana peraturan-peraturan tersebut digunakan untuk menjawab analisis kasus PT Dharmatama Megah Finance dan memberikan solusi hukum dalam permasalahan hukum yang dihadapi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.² Penulis menginventarisasikan peraturan-peraturan untuk menjawab permasalahan dari pemberian perlindungan hukum kepada konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan pihak *finance* yang menggunakan fasilitas *channeling* menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan beserta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Pendekatan Perundang-undangan atau *Statuta Approach* dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisis

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 157.

sehingga peneliti dapat mempelajari konsistensi dan kesesuaian antar peraturan.³

2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis mempunyai maksud utama yaitu mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁴ Dengan Pendekatan Analitis atau *Analytical Approach*, maka peneliti akan menganalisis isu hukum yang terjadi sehingga terdapat makna baru yang ada dalam suatu aturan hukum tersebut.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam menganalisis isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini maka diperlukannya beberapa sumber untuk menunjang preskripsi yang sesuai dan seharusnya. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁵

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁶ Bahan Hukum Primer tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti undang-

³ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

⁴ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 301.

⁵ P. van Dijk, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Tjeenk-Willijkn, 1985, hlm. 181.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*, hlm. 141.

undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, catatan risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan lain sebagainya. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Secondary sources atau Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer beserta implementasinya atau dapat dikatakan semua publikasi tentang hukum namun yang bukan termasuk bagian dari dokumen-dokumen resmi. Manfaat dari *secondary source* atau Bahan Hukum Sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁷ seperti melakukan kajian kepustakaan terkait dengan bahasan penelitian yang berupa:

- a. Buku literatur yang termasuk skripsi dan tesis;
- b. jurnal hukum;

⁷ Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 54.

- c. pendapat ahli;
- d. penelusuran di internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier (*tertiary sources*), yaitu bahan-bahan yang dapat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus, yang terdiri dari kamus Bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.⁸ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- a. Kamus Hukum; dan
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam memperoleh Bahan Hukum, penulis melakukan identifikasi dan inventarisasi peraturan perundang-undangan serta pengklasifikasian bahan hukum. Penulis melakukan teknik memperoleh bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam studi kepustakaan (*library research*)⁹. Dalam penelusuran bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, penulis memperoleh pada Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, penelusuran melalui internet, dan lain sebagainya yang dapat diklasifikasikan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan penelitian.

⁸ *Ibid*, hlm.196.

⁹ Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

E. Teknik Analisis Badan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang tertulis. Sistematisasi tersebut berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum yang tertulis tersebut untuk dapat memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.¹⁰ Teknik analisis data tersebut menggunakan teknik interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum.¹¹ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam pengolahan bahan hukum primer, penulis melakukan penganalisisan dan penginterpretasian pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Dalam pengolahan bahan hukum sekunder, penulis mengumpulkan buku-buku atau kepustakaan beserta jurnal-jurnal hukum yang terkait. Dalam pengolahan bahan hukum tersier, penulis mengumpulkan kamus bahasa Indonesia maupun kamus hukum untuk menunjang berbagai hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.
- b) Mengelolah bahan hukum yang telah didapatkan, yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenadamedia, Jakarta, 2005, hlm. 251-252.

¹¹ Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 93.

- 1) Bahan primer digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang telah terkait dengan pengalihan piutang dalam perjanjian pemberian pembiayaan melalui pembiayaan *Channeling*.
 - 2) Bahan hukum sekunder digunakan untuk menganalisis dari berbagai sumber buku, pendapat para pakar hukum beserta jurnal-jurnal hukum yang akan membentuk suatu sinkronisasi dengan bahan hukum primer.
 - 3) Bahan hukum tersier digunakan untuk menganalisis dengan menggunakan kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan lain sebagainya untuk memberi suatu penjelasan secara teoritis.
- c) Menginterpretasi terhadap ketiga bahan hukum dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi eksentif.
- 1) Penafsiran tata bahasa (gramatikal) adalah berdasarkan ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan pedoman pada arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan.¹²
 - 2) Penafsiran sistematis dilakukan dengan cara melakukan penafsiran yang menghubungkan pasal demi pasal dalam suatu perundang-undangan yang saling berkaitan satu dengan yang lain dan dengan membaca suatu penjelasan dari perundang-undangan sehingga dapat dengan mudah dipahami.

Dari keseluruhan bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penulis menelaah dan menganalisis secara

¹² C. S. T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 36.

keseluruhan sehingga dapat menyajikan penulisan yang sistematis sehingga target yang hendak dicapai yaitu dapat menjawab permasalahan penelitian dapat dipenuhi. Dalam hal menganalisis data-data tersebut, penulis menggali bahan hukum untuk membantu proses penganalisisan implikasi yuridis pengalihan hak Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

F. Definisi Konseptual

Dalam penulisan skripsi sangat diperlukan batasan konsep yang berguna sebagai suatu penegasan dalam konsep-konsep utama yang digunakan oleh penulis. Adapun batasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan Fidusia adalah suatu cara pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- b. Perlindungan Hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum bentuk preventif dan perlindungan hukum bentuk represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang digunakan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
- c. Pembiayaan *Channeling* adalah kerjasama yang dilakukan oleh pihak Perusahaan Pembiayaan dengan pihak Bank Umum yang keseluruhan

dana untuk pembiayaan pihak Perusahaan Pembiayaan yang berasal dari bank umum dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada bank umum.



BAB IV

PEMBAHASAN

1. Kasus Posisi PT Dharmatama Megah Finance

PT Dharmatama Megah Finance merupakan perusahaan pembiayaan konsumen yang pada saat ini tengah mengalami beberapa permasalahan hukum yang dapat dikatakan belum terdapat penyelesaian dari permasalahan tersebut. Permasalahan hukum yang terjadi adalah pihak konsumen tidak dapat memiliki atau mengambil BPKB miliknya setelah adanya pelunasan yang dilakukan pihak konsumen kepada pihak PT Dharmatama Megah Finance. Kasus tersebut berawal dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh salah satu konsumen dari PT Dharmatama Megah Finance kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan yang mana pihak PT Dharmatama Megah Finance belum memberikan BPKB yang seharusnya sudah dapat diberikan kepada konsumen tersebut. Konsumen yang telah mengajukan pengaduannya membawa serta alat bukti yang berupa surat bukti keterangan lunas yang dikeluarkan oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance dan disertai dengan tanggal pelunasan dari kredit kendaraan tersebut.

Surat bukti keterangan lunas yang dikeluarkan oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pelunasan kepada PT Dharmatama Megah Finance setelah adanya nama konsumen tersebut pada Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) pada Bank Indonesia dan tercatat dengan kolektabilitas 5 (lima) yaitu dengan status macet pada Bank X dan dengan adanya keterangan memiliki sejumlah pinjaman pada Bank X tersebut. Adanya *track record* yang

kurang baik terhadap konsumen dari PT Dharmatama Megah Finance tersebut yangmana sebenarnya bukan menjadi kesalahan dari konsumen itu sendiri, namun konsumen tersebut menjadi koban dari kesalahan yang dilakukan oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance.

Respon yang diberikan oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance terhadap peristiwa tersebut dapat dikatakan kurang bertanggungjawab pasalnya pihak PT Dharmatama Megah Finance tidak dapat melakukan tindakan secara nyata yang hanya memberikan keterangan bahwa PT Dharmatama Megah Finance tersebut masih memiliki urusan secara internal dengan pihak Bank X sehingga BPKB yang seharusnya sudah dapat dimiliki oleh konsumen tersebut masih menjadi jaminan pada Bank X dan berakibat pada konsumen itu sendiri yaitu konsumen tidak dapat menarik BPKB yang sudah menjadi haknya. Fakta hukumnya, apabila terdapat bukti bahwa pihak Konsumen telah melunasi kewajibannya dan yang melakukan wanprestasi adalah PT Dharmatama Megah Finance maka pihak PT Dharmatama Megah Finance mempunyai kewajiban untuk menyerahkan BPKB kendaraan kepada pihak konsumen. Namun karena yang menyimpan BPKB kendaraan milik konsumen adalah pihak Bank X, dengan kata lain BPKB tersebut menjadi jaminan untuk mendapatkan fasilitas *channeling* maka Bank X akan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban dari PT Dharmatama Megah Finance yang macet sehingga PT Dharmatama Megah Finance dapat mengambil BPKB milik konsumennya.

Dari permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT Dharmatama Megah Finance ini, tidak hanya merugikan pihak Bank X selaku pihak yang memberikan

dana atau memberikan fasilitas *channeling* itu, melainkan berdampak buruk juga kepada konsumen dari PT Dharmatama Megah Finance yang lain adalah :

- a. Tidak dapat mengambil BPKB yang sudah menjadi hak konsumen tersebut. Konsumen tersebut sudah melakukan pelunasan dan telah menerima bukti pelunasan yang dikeluarkan oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance tidak dapat menerima BPKB yang sudah seharusnya menjadi miliknya karena PT Dharmatama Megah Finance belum melunasi kewajibannya dengan pihak bank. Sedangkan pihak bank merupakan pihak yang menyimpan BPKB yang telah dijadikan objek Jaminan Fidusia tersebut, menyatakan bahwa tidak akan memberikan BPKB tersebut setelah adanya pelunasan dari pihak PT Dharmatama Megah Finance.
- b. *Track record* dari konsumen PT Dharmatama Megah Finance menjadi buruk pada Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) Bank Indonesia. Sebagai pengusaha, konsumen PT Dharmatama Megah Finance ini sangat menjaga nama baik dan *track record* dalam ranah perbankan sehingga setelah dengan adanya permasalahan hukum PT Dharmatama Megah Finance tersebut *track record* dan nama baik konsumen dari PT Dharmatama Megah Finance ini menjadi buruk dan tercatat dengan status macet.

2. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen

2.1 Konstruksi Hukum

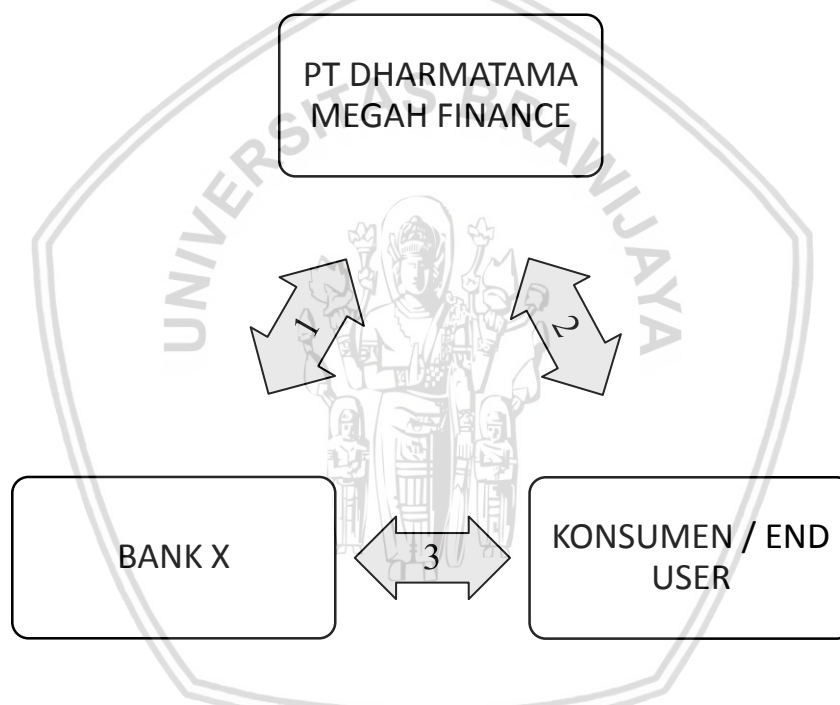
Perjanjian *channeling* merupakan perjanjian yang dibuat oleh pihak Bank dengan pihak perusahaan pembiayaan dalam melakukan penyaluran dana

kepada *End User* yang dalam hal ini, pihak perusahaan pembiayaan sebagai penyalur dana tersebut. Subyek yang terdapat di dalam perjanjian *channeling* tersebut seharusnya terdapat tiga belah pihak, yaitu Pihak Konsumen atau *End User*, pihak PT Dharmatama Megah Finance dan pihak Pihak Bank X. Berikut merupakan skema dari hubungan hukum tersebut.

Bagan 1.

Skema Hubungan Hukum PT Dharmatama Megah Finance

(Sumber : Mind Mapping Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Selatan)



Dalam skema yang tertera di atas, membuktikan bahwa ketiga pihak tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Sekalipun dalam permasalahan hukum yang terjadi, pihak konsumen atau *End User* tidak mengetahui bahwa dirinya juga terikat dengan Bank X namun ketiganya mempunyai hubungan yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Dalam hal pengaturan tentang objek dalam perjanjian *channeling* tersebut secara jelas disebutkan dalam perjanjian pemberian fasilitas

channeling dengan perjanjian pemberian pembiayaan yaitu pemberian sejumlah fasilitas plafond atau sejumlah pinjaman yang diberikan kepada *End User* dengan perantara PT Dharmatama Megah Finance sebagai agen dari pembiayaan tersebut. Pemberian plafond tersebut bertujuan untuk pembiayaan kendaraan roda empat yaitu mobil, baik mobil baru atau mobil bekas yang merupakan tergolong dalam *marketble*. Berikut akan dijelaskan konstruksi hukum dari masing-masing hubungan hukum yang terdapat dalam perjanjian *channeling* tersebut:

2.1.1 Konstruksi Hukum Bank X dengan PT Dharmatama Megah Finance (Agen)

Hubungan hukum yang terjalin antara Bank X dengan PT Dharmatama Megah Finance merupakan hubungan kerjasama pendanaan dengan fasilitas *channeling* dimana Bank X memberikan bantuan dana yang akan diberikan sepenuhnya kepada PT Dharmatama Megah Finance yang telah diperjanjikan dalam perjanjian *channeling*.

2.1.1.1 Para Pihak dalam Konstruksi Hukum Bank X dengan PT Dharmatama Megah Finance

Dalam hubungan hukum tersebut pihak-pihak yang terkait adalah pihak Bank X yang merupakan pihak pertama dimana dalam hal ini pihak Bank X merupakan penyedia dana. Sedangkan PT Dharmatama Megah Finance merupakan pihak kedua yang mana PT Dharmatama Megah Finance tersebut bertindak sebagai agen. Para Pihak tersebut disebutkan di dalam

perjanjian persetujuan kredit antara pihak Bank X dengan pihak PT Dharmatama Megah Finance dengan menjelaskan identitas para pihak yang membuat dan menyetujui isi perjanjian tersebut.

2.1.1.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hubungan hukum antara pihak Bank X dengan pihak PT Dharmatama Megah Finance tersebut telah diatur dalam Pasal 27 PERMENKEU Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Pasal 42 POJK nomor 29/PMK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Namun dalam hal ini PERMENKEU dan POJK belum mengatur secara detail tentang pelaksanaan channeling tersebut. Hal-hal yang diatur adalah garis besar dari kerjasama channeling tersebut dan pihak yang akan menanggung risiko. Dari hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak, yaitu sebagai berikut:

i. Pihak Bank X

Kewajiban dari pihak Bank X tersebut adalah memberikan kredit yaitu sejumlah fasilitas plafond yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian *Channeling* untuk pembiayaan kendaraan roda empat yaitu mobil, yang dalam hal ini adalah mobil bekas dan mobil baru yang tergolong *marketable*. Dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Bank X tersebut maka akan timbul

beberapa hak yang diterima pihak Bank X, yaitu sebagai berikut:

(1) Ketetapan yang dibuat oleh pihak Bank X

Bank X berhak membuat suatu ketetapan yang harus dipatuhi dan diikuti oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance antara lain adalah menentukan prosedur pemberian kredit. Hal tersebut diatur dalam poin 17 (tujuh belas) di dalam Surat Persetujuan Kredit yang dibuat oleh pihak Bank X dengan Pihak PT Dharmatama Megah Finance.

Ketika pihak PT Dharmatama Megah Finance tidak menaati dan tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak Bank X maka pihak Finance tidak dapat menerima kredit tersebut.

(2) Meminta informasi kepada pihak PT Dharmatama Megah Fiance

Pihak Bank mempunyai kewenangan untuk meminta setiap informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak Bank X kepada pihak PT Dharmatama Megah Finance. Hal tersebut diatur dalam poin 17 (tujuh belas) di dalam Surat Persetujuan Kredit yang dibuat oleh pihak Bank X dengan Pihak PT Dharmatama Megah Finance. Informasi-informasi tersebut dapat berupa data-data

atau pernyataan-pernyataan yang sewaktu-waktu berguna dan diperlukan oleh pihak Bank X. Begitu juga dalam mendapatkan informasi, pihak Bank X berhak mengetahui setiap informasi yang terdapat pada pihak PT Dharmatama Megah Finance. Informasi tersebut antara lain berupa perubahan-perubahan terhadap pengurus atau pemegang saham pada PT Dharmatama Megah Finance. Informasi lain yang harus pihak Bank X ketahui adalah perubahan terhadap anggaran dasar dari PT Dharmatama Megah Finance.

ii. Pihak PT Dharmatama Megah Finance atau Agen

Dalam hal ini, Pihak PT Dharmatama Megah Finance bertindak sebagai agen yangmana akan mengelola kegiatan tersebut. Sebagai agen atau pengelola, PT Dharmatama Megah Finance akan mendapatkan hak nya yang berupa imbalan atau fee dari pengelolaan dana tersebut. Hal pemberian imbalan atau *fee* tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) PERMENKEU Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Pasal 42 ayat (4) POJK nomor 29/PMK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Dalam hal bertindak menjadi agen, PT Dharmatama Megah Finance mempunyai beberapa kewajiban kepada pihak Bank X sebagai berikut:

(1) Menyerahkan Laporan kepada pihak Bank X

Pihak PT Dharmatama Megah Finance harus menyerahkan laporan keuangan secara periodik yaitu 6 (enam) bulan selambat-lambatnya enam puluh hari setelah akhir periode. Hal tersebut diatur pasal 5 di dalam Perjanjian Persetujuan Kredit yang dibuat oleh pihak Bank X dengan Pihak PT Dharmatama Megah Finance. Dari laporan keuangan yang dilaporkan kepada pihak Bank X maka pihak Bank X dapat mengetahui secara rinci keadaan yang terjadi di dalam PT Dharmatama Megah Finance tersebut sehingga apabila terdapat sesuatu hal yang terjadi maka PT Dharmatama Megah Finance dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Pihak Bank X dengan mengacu pada Laporan Keuangan tersebut.

(2) Memberikan segala informasi tentang *End User* kepada pihak Bank X

Informasi-informasi dan segala data tentang *End User* harus disediakan oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance apabila pihak Bank X

memerlukannya sewaktu-waktu. Hal tersebut diatur pasal 5 di dalam Perjanjian Persetujuan Kredit yang dibuat oleh pihak Bank X dengan Pihak PT Dharmatama Megah Finance. Pihak PT Dharmatama Megah Finance dalam hal ini tidak diperkenankan untuk melakukan pemalsuan atau menutupi data-data yang diperlukan oleh pihak Bank X sehingga wajib bagi PT Dharmatama Megah Finance untuk memberikan secara lengkap dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang diperlukan oleh pihak Bank X.

Tabel 2.

Hak-Kewajiban Bank X dan PT Dharmatama Megah Finance

Para Pihak	Hak	Kewajiban
Bank X	a. Membuat suatu ketetapan dalam pelaksanaan perealisasiian kredit. b. Meminta informasi kepada PT Dharmatama Megah Finance	Memberikan kredit yaitu sejumlah fasilitas plafond yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian <i>Channeling</i> untuk pembiayaan kendaraan roda empat
PT Dharmatama Megah Finance	Mendapatkan hak yang berupa imbalan atau fee dari pengelolaan dana.	a. Menyerahkan laporan kepada pihak Bank X secara periodik. b. Memberikan segala informasi kepada pihak Bank X.

2.1.2 Konstruksi Hukum PT Dharmatama Megah Finance dengan Pihak Konsumen

Dalam perjanjian pemberian kredit, antara pihak konsumen dengan pihak PT Dharmatama Megah Finance tersebut diperjanjikan dan disetujui dalam perjanjian pemberian pembiayaan dan jaminan secara fidusia. Dalam perjanjian tersebut para pihak yang telah menyetujui isi pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian tersebut akan terikat satu dengan yang lainnya.

2.1.2.1 Para Pihak dalam Konstruksi Hukum PT Dharmatama Megah Finance dengan Pihak Konsumen

Pihak-pihak yang terkait adalah PT Dharmatama Megah Finance yang dalam hal ini adalah pihak kreditur dan pihak kedua adalah konsumen dari PT Dharmatama Megah Finance yang disebut dengan debitur. Hal tersebut dijelaskan di dalam pembukaan Perjanjian Pemberian Pembiayaan dan Jaminan Secara Fidusia dengan menjelaskan identitas para pihak yang terdapat di dalam perjanjian tersebut.

2.1.2.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pelaksanaan hubungan hukum dari para pihak tersebut secara detail belum diatur dalam peraturan perundangan-undangan termasuk di dalam PERMENKEU dan POJK. Dalam perjanjian pemberian pembiayaan tersebut, para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat para pihak-

pihaknya. Berikut merupakan hak dan kewajiban dari para pihak:

i. Pihak Konsumen atau debitur

Pihak Konsumen atau dalam hal ini adalah pihak debitur, berhak mendapatkan pembiayaan sesuai dengan nominal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance atau pihak kreditur. Maka kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur adalah sebagai berikut:

(1) Melakukan pembayaran

Debitur wajib melakukan pembayaran angsuran tepat pada waktu yang telah diperjanjikan dan dilakukan kepada dan di Kantor PT Dharmatama Megah Finance atau kantor cabang perwakilan kreditur atau dapat pula di tempat yang sewaktu-waktu ditentukan oleh Kreditur tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Secara Fidusia. Apabila dalam masa pembayaran, debitur tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu atau apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan debitur tidak dapat membayar angsuran kurang dari jumlah yang ditetapkan maka akan dikenakan denda

keterlambatan yang besarnya telah ditentukan oleh pihak kreditur.

(2) Menjamin keadaan dari kendaraan

Pihak debitur mempunyai kewajiban penuh terhadap kondisi dari kendaraan tersebut. Tidak hanya kondisi fisik yang harus dijamin oleh pihak debitur namun debitur harus menjamin status dari kendaraan tersebut bebas dari sengketa atau tidak dalam keadaan disita atau dijaminkan kepada pihak lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Secara Fidusia. Sehingga dalam hal ini, debitur juga tidak diperbolehkan menyewakan, meminjamkan atau memindah tangankan kendaraan tersebut kepada pihak lain.

Dalam hal pembayaran pajak maupun segala ongkos perawatan dan lain sebagainya, juga menjadi tanggung jawab dari pihak debitur itu sendiri. Untuk menjamin keadaan dari kendaraan tersebut, debitur berkewajiban untuk memberikan laporan tertulis kepada pihak kreditur secara rutin. Untuk menghindari bahaya terhadap kebakaran, kehilangan dan lain-lain maka debitur wajib mengasuransikan kendaraan tersebut dengan

nominal dan perusahaan asuransi yang telah ditetapkan oleh pihak kreditur.

ii. Pihak PT Dharmatama Megah Finance atau Kreditur

Pihak kreditur atau PT Dharmatama Megah Finance mempunyai kewajiban untuk memberikan fasilitas kredit kepada pihak debitur sesuai dengan nominal yang telah diperjanjikan dan memberikan bukti pembayaran yang sah kepada pihak debitur yang akan digunakan sebagai bukti pelunasan angsuran yang telah dilakukan oleh debitur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Secara Fidusia Berikut merupakan hak-hak dari PT Dharmatama Megah Finance selaku pihak kreditur:

(1) Menerima pembayaran angsuran pihak debitur

Pihak kreditur berhak menerima pembayaran angsuran sesuai dengan jumlah atau nominal yang telah diperjanjikan sebelumnya sesuai dengan waktu yang juga diperjanjikan. Apabila terjadi keterlambatan atau jumlah angsuran yang kurang pada tempo waktu yang telah diperjanjikan maka kreditur berhak mengenakan denda sebesar yang telah tercantum dalam perjanjian pemberian kredit. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 Perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Secara Fidusia

(2) Menuntut atau menagih seluruh pembayaran hutang debitur dengan seketika dan sekaligus.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Secara Fidusia. Pihak kreditur mempunyai hak untuk menuntut dan menagih seluruh hutang debitur seketika dan sekaligus apabila pihak debitur telah melakukan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Pihak debitur lalai dalam membayar angsuran selama dua puluh hari atau berturut-turut membayar hanya sebagian dari angsuran sehingga kekurangan pembayaran tersebut apabila dijumlahkan sama dengan jumlah angsuran satu bulan.
- b) Pihak debitur dianggap lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian pemberian kredit atau pihak kreditur telah melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian tersebut,
- c) Pihak debitur memberikan keterangan atau dokumen-dokumen yang digunakan sebagai jaminan tersebut terbukti tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau tidak benar.

- d) Pihak debitur mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau untuk penundaan pembayaran hutang-hutangnya kepada instansi yang berwenang.
- e) Pihak debitur tidak menyerahkan BPKB dari kendaraan tersebut kepada pihak kreditur dalam kurun waktu dua bulan sejak tanggal perjanjian.

(3) Mengalihkan piutang

Hal lain yang menjadi hak dari pihak kreditur adalah dapat mengalihkan piutang kepada pihak lain dan pihak debitur akan memberikan persetujuan di muka terhadap pengalihan piutang tersebut tanpa diperlukan lagi suatu pemberian resmi atau dalam bentuk atau cara lainnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Pembiayaan dan Jaminan Secara Fidusia.

Tabel 3.

Hak-Kewajiban Debitur dan PT Dharmatama Megah Finance

Para Pihak	Hak	Kewajiban
PT Dharmatama Megah Finance	<ul style="list-style-type: none"> a. Menerima pembayaran angsuran dari pihak debitur atau konsumen. b. Menuntut dan menagih seluruh pembayaran hutang debitur dengan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan fasilitas kredit kepada pihak debitur sesuai dengan nominal yang telah diperjanjikan. b. Memberikan bukti pembayaran yang sah kepada pihak debitur

	seketika dan sekaligus.	
	c. Mengalihkan piutang.	
Debitur atau Konsumen	Mendapatkan pembiayaan sesuai dengan nominal yang telah disepakati.	a. Melakukan pembayaran. b. Menjamin Keadaan dari Kendaraan.

2.1.3 Konstruksi Hukum Pihak Konsumen atau End User dengan pihak Bank X

Hubungan hukum yang terjalin antara pihak Konsumen atau *End User* dengan pihak Bank X tercantum pada perjanjian pemberian fasilitas *channeling* antara pihak Bank X dengan pihak PT Dharmatama Megah Finance yang berperan sebagai agen. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penyerahan dokumen-dokumen atau informasi-informasi milik konsumen atau *End User* oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance atau agen kepada Bank X.

2.1.3.1 Para Pihak dalam Konstruksi Hukum Pihak Konsumen dengan pihak Bank X

Para pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut adalah pihak Bank X dengan pihak Konsumen atau dalam hal ini disebut sebagai *End User*. Dalam hal ini pihak konsumen tidak mengetahui bahwa dirinya mengikatkan diri kepada pihak Bank X, mengingat dalam perjanjian pemberian pembiayaan terdapat klausul yang menyatakan bahwa pihak konsumen memberikan persetujuan di muka kepada pihak PT Dharmatama Megah Finance untuk mengalihkan piutang tersebut tanpa memberikan

permemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga dari klausul tersebut seakan memutuskan hubungan hukum antara pihak konsumen atau *End User* dengan pihak Bank X.

2.1.3.2 Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam Pelaksanaan hubungan hukum tersebut, masih belum diatur secara mendetail di dalam peraturan perundang-undangan, baik di dalam PERMENKEU maupun POJK sehingga dalam proses pelaksanaan masih berisiko untuk terjadi sengketa. Karena ketidaktahuan pihak konsumen bahwa dirinya terikat dengan pihak Bank X namun hal tersebut tidak melepaskan timbulnya suatu hak dan kewajiban bagi para pihak meskipun secara tidak langsung tertulis dalam suatu perjanjian yang utuh. Berikut merupakan penjelasan hak dan kewajiban dari pihak Konsumen atau *End User* dengan pihak Bank X:

i. Pihak Konsumen

Hak dari pihak konsumen adalah mendapatkan fasilitas pembiayaan yang telah diperjanjikan yang pemberiannya melalui pihak PT Dharmatama Megah Finance yang bertindak sebagai agen. Secara tidak langsung fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen atau *End User* merupakan dana yang berasal dari Bank X yang diberikan kepada pihak agen melalui fasilitas *channeling*. Dari hal tersebut maka timbullah kewajiban dari pihak konsumen atau *End User*, yaitu sebagai berikut:

(1) Membayar angsuran

Pihak konsumen atau *End User* mempunyai kewajiban untuk membayar angsurannya sesuai jumlah yang telah disepakati dengan tepat waktu. Pembayaran angsuran tersebut dibayarkan kepada pihak PT Dharmatama Megah Finance selaku agen fasilitas tersebut untuk dapat diteruskan kepada pihak Bank X.

(2) Menyerahkan dokumen-dokumen

Dalam perjanjian pemberian pembiayaan, pihak Bank X dapat meminta segala informasi maupun dokumen milik konsumen atau *End User* melalui perantara PT Dharmatama Megah Finance. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Persetujuan Kredit yang dibuat oleh pihak Bank X dengan pihak PT Dharmatama Megah Finance. Dalam hal ini, pihak konsumen mempunyai kewajiban untuk menyerahkan segala dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang diperlukan oleh Bank X melalui PT Dharmatama Megah Finance. Meskipun tidak terjadi komunikasi yang secara langsung antara pihak konsumen atau *End User* dengan pihak Bank X namun pihak PT Dharmatama Megah Finance yang menjadi perantara antara kedua pihak tersebut.

Dalam hal mendapatkan fasilitas tersebut, maka pihak konsumen atau *End User* wajib menyerahkan dokumen-dokumen miliknya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Surat Pernyataan Penyerahan BPKB Asli, bermeterai dari Dealer (BPKB asli wajib diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Pernyataan Penyerahan BPKB).
- b) Faktur Pembelian Asli
- c) Gesekan nomor Rangka dan Noor Mesin Kendaraan
- d) 3 (tiga) lembar kwitansi kosong yang ditandatangani *End User*, 1 (satu) bermeterai
- e) Kwitansi Uang Muka/Kwitansi Pelunasan
- f) Polis Asuransi

Sedangkan untuk penyerahan jaminan untuk kendaraan bekas adalah sebagai berikut:

- a) BPKB Asli
- b) Faktur Pembelian Asli
- c) Gesekan nomor Rangka dan Nomor Mesin Kendaraan
- d) Fotocopy KTP atas nama yang tercantum terakhir di BPKB

- e) 3 (tiga) lembar kwitansi kosong yang ditandatangani *End User*, 1 (satu) bermeterai
- f) Kwitansi Uang Muka/Kwitansi Pelunasan
- g) Polis Asuransi

ii. Pihak Bank X

Kewajiban Bank X kepada pihak Konsumen atau *End User* adalah memberikan fasilitas pembiayaan untuk konsumen atau *End User* melalui PT Dharmatama Megah Finance yang telah mendapat fasilitas *channeling* dari Bank X. Beberapa hal yang menjadi hak dari Bank X terhadap *End User* adalah:

(1) Mendapatkan dokumen-dokumen milik *End User*

Bank X mempunyai hak untuk mendapat segala informasi dan dokumen milik *End User* yang dirasa diperlukan untuk kepentingan pemberian fasilitas tersebut. Dokumen-dokumen atau informasi-informasi milik *End User* dapat diberikan oleh PT Dharmatama Megah Finance apabila sewaktu-waktu diperlukan.

(2) Melakukan survei terhadap *End User*

Pihak Bank X mempunyai hak melakukan survei terhadap *End User* secara periodik. Melakukan survei tersebut dapat secara langsung dilakukan oleh pihak Bank X tersebut baik untuk permohonan kredit baru maupun kredit yang sudah lama berjalan.

Tabel 4.

Hak-Kewajiban Pihak Bank X dan Konsumen

Para Pihak	Hak	Kewajiban
Pihak Bank X	a. Mendapatkan dokumen-dokumen milik <i>End User</i> . b. Melakukan survei terhadap <i>End User</i> .	Memberikan fasilitas pembiayaan untuk konsumen atau <i>End User</i> melalui PT Dharmatama Megah Finance.
Konsumen atau <i>End User</i>	Mendapatkan fasilitas pembiayaan yang telah diperjanjikan yang pemberiannya melalui pihak PT Dharmatama Megah Finance.	a. Membayar angsuran. b. Menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh pihak Bank X.

2.2 Perlindungan Hukum Kepada Konsumen

Pengertian atau definisi dari Perlindungan hukum itu sendiri menurut

Setiono adalah:

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹

Dari Pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh **Setiono** tersebut menjelaskan adanya suatu tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat luas dari hal-hal atau perbuatan yang sewenang-sewenang oleh penguasa sehingga terciptanya suatu ketertiban serta ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Dengan kata lain perlindungan hukum tersebut adalah sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat

¹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.² Teori perlindungan hukum itu sendiri telah diungkapkan oleh **Philipus M. Hadjon** yang menyatakan bahwa perlindungan hukum tersebut terbagi atas dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

2.2.1 Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif.³ Tujuan dari perlindungan hukum preventif yaitu untuk mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan jenis ini misalnya sebelum Pemerintah menetapkan suatu aturan atau keputusan, rakyat dapat mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.⁴

Perlindungan hukum preventif memiliki peranan yang sangat penting guna menjaga ketertiban dalam bermasyarakat dan bernegara dikarenakan adanya suatu aturan yang jelas mengenai konsep kebebasan yang berlaku dalam masyarakat sehingga hak-hak setiap individu dapat dipahami dengan baik.⁵ Berikut merupakan

²Praskoabdullah, 2011, **Definisi Perlindungan Hukum** (online), <http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>, (31 Januari 2018 pukul 15.10).

³ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)**, Surabaya, Perdaban, 2007, hlm. 2.

⁴ Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 3.

⁵ Hendera, **Perlindungan Hukum Terhadap Bank Bila Terjadi Kredit Macet Oleh Debitor Penanam Modal Asing**, Arena Hukum, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 199.

perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada konsumen yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Perjanjian *Channeling* pihak PT Dharmatama Megah Finance dengan pihak Bank X, dan Perjanjian Pembiayaan pihak konsumen dengan PT Dharmatama Megah Finance adalah sebagai berikut :

a. Perlindungan hukum preventif kepada konsumen menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999

Perlindungan preventif yang diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 adalah adanya kesesuaian prosedur dalam hal pengeksekusian terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Dalam hal melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, kreditur harus memenuhi ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b) penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia

- sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.⁶

Dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam hal mengeksekusi benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan dengan persetujuan pihak debitur Pemberi Fidusia tersebut. Kegiatan penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dapat dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut:

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut, apabila pihak kreditor atau Penerima tersebut tidak melaksanakan seperti yang diinstrumenkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 maka hal tersebut dapat batal demi hukum. Hal tersebut tercantum pada Pasal 32 yang menyatakan:

⁶ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

⁷ Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.⁸

Pasal tersebut menegaskan bahwa walaupun pihak kreditor memiliki sertifikat Fidusia yang kekuatan eksekutorialnya sama dengan putusan pengadilan, namun pihak kreditor tidak dapat sewenang-wenang dalam melakukan eksekusi tersebut. Dari pasal tersebut debitur juga dapat mengetahui ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Pasal 29 ayat Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 sehingga apabila pihak kreditor tidak melakukan eksekusi sesuai yang diinstrumenkan maka pihak debitur dapat menghentikannya dan melakukan penolakan.

b. Perlindungan hukum preventif kepada konsumen menurut Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006

Perlindungan preventif yang diberikan oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006 adalah dengan adanya pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan.

Maksud dari pengawasan tersebut adalah pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sendiri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan tentang

⁸ Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006 yang menyatakan: Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan.⁹

Hal tersebut menyebutkan bahwa Menteri Keuangan tidak hanya melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan tersebut namun Menteri Keuangan tersebut juga melakukan pembinaan kepada Perusahaan Pembiayaan. Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Perusahaan Pembiayaan, Menteri Keuangan tidak hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung melainkan juga melakukan pengawasan yang secara langsung. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006, yang menyatakan: Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁰

Dari pernyataan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa dalam melakukan kegiatannya, Perusahaan Pembiayaan masih di bawah pengawasan dari Menteri Keuangan tersebut. Ketika terjadi permasalahan hukum, Menteri Keuangan dapat sewaktu-waktu memberikan tindakan hukum kepada Perusahaan Pembiayaan

⁹Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

¹⁰ Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

apabila Perusahaan Pembiayaan melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

c. Perlindungan Hukum Preventif Kepada Konsumen Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur ketentuan untuk perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan pembiayaan dengan pembebanan Jaminan Fidusia karena dalam suatu pembentukan suatu peraturan tersebut juga merupakan wujud dari perlindungan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa.

Sebagai perlindungan hukum preventif yang mencegah terjadinya permasalahan hukum yang akan terjadi maka analisis perlindungan preventif menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang adalah sebagai berikut :

- i. Memberi penjelasan sebelum konsumen menandatangani perjanjian tersebut.

Dengan memberikan tanda tangan maka pihak konsumen secara sadar telah mengetahui secara jelas isi perjanjian yang telah dibuat dan diperjanjikan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan, yaitu:

Sebelum konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.¹¹

Memberikan keterangan kepada konsumen sebelum konsumen menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut, pihak *finance* mempunyai kewajiban untuk memberikan penjelasan yang secara jelas tentang isi dari pasal-pasal yang dimuat dalam perjanjian tersebut dan menyampaikan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan kebutuhan konsumen tersebut. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dimuat di dalam perjanjian *finance* dengan konsumen tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu:

Syarat dan ketentuan produk/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- 1) rincian biaya, manfaat dan risiko; dan
- 2) prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.¹²

¹¹ Pasal 11 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹² Pasal 11 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- ii. Melarang pihak *finance* menggunakan strategi pemasaran yang dapat menjebak konsumen.

Pelarangan untuk menggunakan strategi pemasaran yang dapat menjebak para konsumen tersebut secara jelas tertuang dalam Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu:

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.¹³

Dari ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dapat dipastikan bahwa pihak *finance* dilarang menggunakan strategi pemasaran yang dapat merugikan konsumen sehingga ketika dalam keadaan tertentu konsumen dihadapkan pada suatu keadaan dimana mereka tidak dapat mengambil keputusan. Hal tersebut sama halnya dengan membuat pernyataan yang merugikan konsumen tersebut.

- iii. Memberikan edukasi kepada Konsumen

Perusahaan Pembiayaan diwajibkan untuk menyelenggarakan edukasi kepada konsumen yang bertujuan

¹³ Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

untuk dapat meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, yang menyatakan sebagai berikut:

Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.¹⁴

Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut harus menyusun program memberikan edukasi tersebut sebagai program rutin yang dilakukan pertahunnya dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan-ketentuan dalam menyelenggarakan edukasi tersebut diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Edukasi Nomor 1/SEOJK.07/2014. Dalam pelaksanaannya, program edukasi tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut¹⁵:

(1) Inklusif

Inklusif adalah pencakupan Literasi Keuangan hingga semua golongan masyarakat tanpa ada yang terkecuali.

(2) Sistematis dan terukur

¹⁴ Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

¹⁵ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Edukasi Nomor 1/SEOJK.07/2014.

Sistematis dan terukur adalah penyampaian Literasi Keuangan harus disampaikan secara terprogram, mudah untuk dipahami, sederhana dan pencapaiannya mudah diukur. Dalam hal pengukuran pencapaian, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan survei kepada masyarakat tentang pemahaman terhadap penyampaian program edukasi tersebut.

(3) Kemudahan akses

Kemudahan akses adalah informasi tentang keuangan harus tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia begitu juga halnya dengan kemudahan terhadap pelayanannya. Kemudahan tersebut dapat berupa ketersediaan informasi dan simulasi yang dapat dengan mudah diakses melalui website atau bentuk selebaran yang tersedia di setiap kantor cabang Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(4) Kolaborasi

Kolaborasi adalah kegiatan untuk melibatkan pemangku kepentingan secara bersama-sama dalam mengimplementasikan Literasi Keuangan. Dalam hal ini, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat melakukan program edukasi tersebut secara bersama-sama dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang lain atau dapat dilakukan secara sendiri. Program edukasi tersebut

dititikberatkan pada pemberian informasi dasar dan layanan jasa keuangan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan manfaat, biaya dan risiko yang akan terjadi bukan melakukan pemasaran produk dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Setelah melakukan program edukasi tersebut, Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus melaporkan laporan pelaksanaan program edukasi kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap tanggal 30 bulan Januari di tahun berikutnya.

d. Perlindungan Hukum Preventif Kepada Konsumen Menurut Perjanjian Channeling Antara PT Dharmatama Megah Finance Dengan Pihak Bank X

Perjanjian *Channeling* yang dibuat oleh PT Dharmatama Megah Finance dengan pihak Bank X menyertakan perlindungan hukum preventif bagi konsumennya yang dalam perjanjian ini, konsumen disebut sebagai *End User*, melarang melakukan pengalihan dan pelunasan fasilitas pembiayaan atas kredit *End User*.

Dalam hal pemberian perlindungan hukum preventif dimana perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum, pihak pemohon yang mana adalah PT Dharmatama Megah Finance tidak diperbolehkan mengalihkan atau melunasi fasilitas dan pembiayaan kredit *End User* yang sedang berjalan. Hal tersebut mencegah adanya pengalihan hak dan

kewajiban kepada pihak lain di luar pihak-pihak yang ada di dalam perjanjian yang dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam pemenuhan prestasi pada waktu yang sudah ditentukan dan adanya ketidakpastian hukum yang mengikat para pihak.

Pengalihan dan pelunasan fasilitas pembiayaan atas kredit *End User* dapat dilakukan apabila ada beberapa kondisi yang terjadi dan menyebabkan pengalihan dan pelunasan fasilitas pembiayaan atas kredit *End User* diperbolehkan. Kondisi tersebut antara lain:

- (1) *End User* telah menyelesaikan fasilitas kredit yang telah jatuh *tempo*.
- (2) *End User* telah melakukan pelunasannya sendiri dan dalam hal ini pihak Bank mempunyai hak untuk melakukan konfirmasi secara langsung kepada debitur/ *End User*
- (3) Kendaraan milik *End User* telah hilang dan dalam hal ini *End User* harus melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian sehingga *End User* mendapatkan surat keterangan kehilangan sebagai bukti bahwa kendaraan *End User* telah hilang.
- (4) Kredit *End User* dinyatakan macet, oleh sebab itu adanya penarikan kendaraan *End User* dan dilakukan penjualan atas kendaraan tersebut

untuk melunasi kewajiban dari *End User* tersebut.

e. Perlindungan hukum preventif kepada konsumen menurut Perjanjian Pembiayaan antara PT Dharmatama Megah Finance dengan pihak Konsumen

Perlindungan hukum preventif yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan antara PT Dharmatama Megah Finance dengan pihak Konsumen adalah dengan memberikan bukti Pembayaran. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 8 dalam Perjanjian pemberian Pembiayaan dan Jaminan Secara Fidusia. Pada saat pihak konsumen atau pihak debitur telah melakukan pembayaran, maka PT Dharmatama Megah Finance atau yang disebut sebagai pihak kreditur harus menyertakan bukti pembayaran yang sah dari pihak PT Dharmatama Megah Finance. Hal tersebut harus dilakukan oleh PT Dharmatama Megah Finance untuk mencegah adanya permasalahan hukum yang terjadi dan sebagai bukti yang sah bahwa pihak konsumen telah melakukan pembayaran angsuran untuk dapat dilaporkan kepada pihak Bank X. Bukti Pembayaran yang sah tersebut hanya dapat diberikan oleh pihak PT Dharmatama megah Finance kepada pihak konsumen ketika melakukan pembayaran pada kantor PT Dharmatama Megah Finance, apabila pembayaran tersebut dilakukan di luar kantor PT Dharmatama Megah Finance maka bukti pembayaran tersebut

tidak dapat dikatakan sah dan segala risiko yang timbul merupakan tanggungjawab dari pihak konsumen itu sendiri.

Tabel 5.

Aturan-Aturan Perlindungan Preventif yang Belum dan Sudah Diatur

Dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Pembiayaan

Aturan-aturan yang sudah diatur	Aturan-Aturan yang belum diatur
Aturan yang sudah diatur di dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah pihak yang bertanggung jawab apabila risiko-risiko yang ditimbulkan terjadi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan. b. Pengadaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. c. Memberikan penjelasan dan edukasi kepada konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan untuk meningkatkan literasi keuangan. d. Melarang adanya tindakan mengalihkan hak dan melakukan persetujuan pelunasan kepada pihak di luar perjanjian agar konsumen mendapatkan kejelasan dalam melakukan kewajibannya. e. Pemberian tanda bukti yang sah sebagai bukti kepada konsumen bahwa konsumen telah melunasi suatu pembayaran.

2.2.2 Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya.¹⁶ Prinsip perlindungan

¹⁶ Ketut Dezy Ari Utami, **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli di Bawah Tangan (Kajian Terhadap Putusan Nomor : 1860K/Pdt/2005)**, Arena Hukum, Volume 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014, hlm. 296.

hukum baik berupa produk legislatif maupun yurisprudensi berpegang pada hakekat hukum, sumber-sumber hukum dan jenis hukum yang merupakan prinsip dari sebuah negara hukum, sehingga tujuan dari negara hukum sangat berkaitan dengan adanya pengakuan serta upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁷ Peranan perlindungan hukum represif tersebut adalah untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum salah satunya penyelesaian sengketa melalui sarana pengadilan.

Dengan kata lain, perlindungan hukum represif ini sebagai sarana untuk mengakses kembali hak-hak yang hilang melalui penyelesaian sengketa.¹⁸ Perlindungan hukum represif yang diberikan kepada konsumen dapat melalui jalur non-litigasi maupun jalur litigasi. Berikut merupakan penjelasan dari kedua jalur tersebut:

a. Perlindungan Hukum Represif Kepada Konsumen Melalui Jalur Non-Litigasi

Permasalahan hukum yang dialami PT Dharmatama Megah Fianance dapat diselesaikan dengan menempuh jalur non litigasi terlebih dahulu. Dengan adanya jalur non litigasi, para pihak dapat melakukan pengaduan sesuai dengan mekanisme penanganan pengaduan tersebut sehingga dalam tahap ini adanya kemungkinan untuk para pihak memusyawarhkan permasalahan hukum yang terjadi sehingga terdapat suatu kesepakatan dan penyelesaian masalah. Jalur non-litigasi tersebut sebisa mungkin

¹⁷ Phillipus M. Hadjon, **op.cit.** hlm. 30.

¹⁸ Hendera, **Perlindungan Hukum Terhadap Bank Bila Terjadi Kredit Macet Oleh Debitor Penanam Modal Asing**, Arena Hukum, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017, hlm. 199.

menjadi pilihan utama dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum sehingga dapat mengenyampingkan jalur litigasi. Jalur non-litigasi tersebut dapat berbentuk fasilitas penyelesaian pengaduan serta adanya penindakan lanjut yang diberikan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Berikut merupakan penjelasan dari penyelesaian sengketa jalur non-litigasi:

a. Fasilitas Penyelesaian Pengaduan

Dalam hal memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan, mekanisme penanganan pengaduan dibagi menjadi dua tahap yaitu *Internal Dispute Resolution (IDR)* atau yang dikenal dengan Penanganan Pengaduan Tahap 1 (satu). *Internal Dispute Resolution (IDR)* merupakan proses pengaduan yang dilakukan oleh pihak konsumen kepada pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan pengaduan tersebut ditanggapi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan itu sendiri.

Tahap yang kedua adalah *External Dispute Resolution (EDR)* dengan kata lain yaitu Penanganan Pengaduan Tahap 2 (dua). Dalam proses *External Dispute Resolution (EDR)*, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan fasilitas terbatas bagi pihak konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehingga mencapai kata sepakat. Apabila dalam proses memberikan fasilitas tersebut pihak konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan belum mencapai kata sepakat maka pihak

Konsumen dapat upaya penyelesaian pengaduan atau sengketa kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Berikut adalah penjelasan masing-masing tahap penanganan pengaduan:

(1) *Internal Dispute Resolution* atau Penanganan Pengaduan

Tahap 1 (satu)

Internal Dispute Resolution (IDR) merupakan penanganan pengaduan pertama yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagai pihak pertama dalam menanggapi pengaduan konsumen tersebut. Pengaduan yang dilakukan oleh pihak konsumen disampaikan kepada pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan terlebih dahulu. Terdapat dua bentuk indikasi yang akan konsumen adukan yaitu pengaduan yang berindikasi sengketa yang berhubungan dengan konsumen itu sendiri dan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan :

- 1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- 2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.¹⁹

Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima pengaduan tersebut diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran pengaduan serta melakukan pengecekan kelengkapan dokumen pengaduan tersebut.

Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan memberikan konfirmasi pengaduan kepada konsumen dan melakukan koordinasi dengan unit yang terkait. Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan melakukan sejumlah investigasi untuk memastikan kebenaran dari pengaduan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan tersebut secara kompeten, benar dan objektif.
- 2) Melakukan analisis untuk dapat memastikan bahwa pengaduan tersebut benar-benar terjadi.

¹⁹ Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Ketika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyelesaikan investigasinya dan menyatakan bahwa pengaduan tersebut benar adanya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Memberikan pernyataan maaf melalui surat pernyataan tertulis.
- 2) Memberikan penawaran penyelesaian pengaduan.

Dalam hal ini Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menentukan syarat dalam penyelesaian permasalahan tersebut atau Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan melakukan ganti rugi.

Apabila usaha penyelesaian permasalahan hukum oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan menemukan kata sepakat maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut maka harus dilakukan penutupan pengaduan. Dalam hal tersebut, pentingnya penanganan pengaduan tahap satu atau *Internal Dispute Resolution* tersebut agar adanya peningkatan dalam hal kepercayaan pihak konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut mampu mengatasi setiap pengaduan yang diajukan oleh konsumennya.

Dalam hal melaksanakan *Internal Dispute Resolution*, Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus

menerapkan prinsip-prinsip *Internal Dispute Resolution* yang adalah sebagai berikut:

a) Visibilitas

Visibilitas merupakan proses publikasi tentang mekanisme penyampaian pengaduan konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

b) Aksesabilitas

Aksesabilitas merupakan penyediaan fasilitas layanan penanganan pengaduan kepada konsumen dan fasilitas tersebut harus dengan mudah diakses oleh pihak konsumen itu sendiri.

c) Responsif

Responsif merupakan suatu cara pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam memberikan tanggapan kepada pengaduan konsumen. Ketika konsumen melakukan pengaduan maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan sigap dapat melayani, menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan konsumen tersebut.

d) Perlakuan yang adil

Perlakuan yang adil merupakan suatu sikap yang harus diambil oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam menanggapi pengaduan konsumen sehingga setiap pengaduan konsumen tersebut dapat

ditanggapi secara adil, objektif dan tidak memihak pada pihak manapun.

e) Tidak memungut biaya layanan pengaduan

Setiap konsumen yang mengajukan pengaduannya, tidak akan dipungut oleh biaya apapun dan oleh siapapun sehingga pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak akan memungut biaya kepada dalam penanganan pengaduan konsumen.

f) Kerahasiaan data

Pelaku Usaha Jasa Keuangan mempunyai kewajiban untuk merahasiakan informasi-informasi mengenai konsumen kepada pihak manapun sehingga perlindungan terhadap konsumen tersebut akan terjamin.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan berkomitmen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam melaksanakan *Internal Dispute Resolution* tersebut agar Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat mencegah dan menangani pengaduan konsumen tersebut. Dalam hal menangani pengaduan konsumen tersebut, tidak jarang pihak konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan masih belum mencapai suatu kesepakatan dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi sehingga dalam hal ini konsumen akan

mengajukan upaya penyelesaian pengaduan pada tahap selanjutnya yaitu *External Dispute Resolution* atau dengan kata lain Penanganan Pengaduan tahap dua.

(2) *External Dispute Resolution (EDR)* atau Penanganan Pengaduan Tahap Dua

Pihak konsumen yang sudah mengajukan pengaduannya pada tahap pertama namun belum menemukan kesepakatan, maka pihak konsumen tersebut dapat mengajukan pada tahap selanjutnya yaitu *External Dispute Resolution (EDR)* atau yang disebut sebagai Penanganan Pengaduan Tahap Dua. Pada tahap ini, pihak Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan fasilitas terbatas kepada pihak konsumen dan apabila masih belum ada kesepakatan maka pihak konsumen dapat mengajukan upaya penyelesaian sengketa pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berikut adalah penjelasan dari Penanganan Pengaduan Tahap Dua oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa:

a) Pihak Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tujuan untuk dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat luas. Hal tersebut seperti yang tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21

tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai berikut :

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.²⁰

Secara jelas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 menjelaskan bahwa tujuan utama dari Otoritas Jasa Keuangan tersebut tidak lain untuk melindungi kepentingan konsumen dan msayarakat.

Dilihat dari tujuan utamanya, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewajiban juga untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi dalam sektor jasa keuangan pada konsumen dan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai berikut:

OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi:

- a. menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- b. membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku Jasa Keuangan; dan
- c. memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.²¹

Pihak Otoritas Jasa Keuangan yang akan memberikan fasilitas terbatas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan kepada Konsumen oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan telah disepakati oleh kedua belah pihak baik Konsumen itu sendiri maupun pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Kesepakatan tersebut akan dimuat dalam suatu perjanjian fasilitasi yang akan memuat tentang²² :

- a. Kesepakatan untuk memilih penyelesaian pengaduan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. Persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pelaksanaan dari proses fasilitasi yang diberikan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan tersebut hingga pada proses ditandatanganinya Akta Kesepakatan akan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari selama hari kerja sejak penandatanganan

²¹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²² Pasal 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

perjanjian fasilitasi yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak konsumen dan pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Kesepakatan yang terjadi di antara dua belah pihak yaitu pihak konsumen dan pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu :

- 1) Kesepakatan antara Konsumen dan Pelaku Usaha Keuangan yang dihasilkan dari proses fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dituangkan dalam Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.²³

Dengan adanya Akta Persetujuan tersebut maka pihak Konsumen dan pihak Pelaku Usaha Keuangan telah mencapai kesepakatan dari proses fasilitasi yang telah dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam mengajukan pengaduan yang berindikasi sengketa tersebut, konsumen harus

²³ Pasal 46 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

memenuhi beberapa persyaratan yang tertuang dalam Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan sebagai berikut:

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:
 - 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
- c. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
- f. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Keuangan kepada konsumen.²⁴

Pada saat Konsumen telah memenuhi persyaratan yang telah tercantum dalam Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka pihak Otoritas Jasa Keuangan akan mempertemukan para pihak yaitu pihak konsumen itu sendiri maupun pihak Pelaku Usaha Keuangan untuk dapat memusyawarahkan secara kekeluargaan sehingga mendapatkan kesepakatan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

²⁴ Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan, yakni:

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.²⁵

Pengawasan perlindungan konsumen atas kepatuhan dari pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan yang meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan dan pihak Otoritas Jasa Keuangan tersebut mempunyai kewenangan untuk meminta data dan informasi dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang berkaitan tentang pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen yang dapat dilakukan secara berkala maupun dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Setelah adanya musyawarah tersebut, para pihak akan mencapai suatu kata sepakat dan pengaduan tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan

²⁵ Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

kesepakatan yang telah diambil maka pengaduan tersebut dapat terselesaikan. Namun apabila belum mencapai kata sepakat, maka konsumen dapat memilih penyelesaian masalah dengan bantuan LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa).

b) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Ketidaksepakatan antara pihak konsumen dengan pihak Lembaga Jasa Keuangan membuat belum adanya solusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut sehingga apabila belum ada kata sepakat dan konsumen merasa tidak puas atas penanganan pengaduan tersebut maka konsumen dapat meneruskan pengaduannya kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).

Lembaga Alternatif Penyelesaian Masalah didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang telah dikoordinasikan oleh asosiasi Lembaga Jasa Keuangan lainnya dan eksistensinya didukung oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan penyelesaian sengketa yang berada di luar pengadilan dengan prinsip cepat, biaya murah, relevan dan adil. Awal pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) tersebut

dilatarbelakangi oleh seringnya ketidaksepakatan yang terjadi antara pihak konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan sehingga Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terdapat beberapa LAPS, salah satunya yang khusus untuk menangani masalah di lembaga keuangan adalah Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia.

Sesuai dengan instrumen Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.²⁶

Dari pernyataan tersebut maka penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara sehingga dapat melalui arbitrase atau dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Dalam Undang-Undang tentang Arbitrase dan alternatif Penyelesaian Nomor 30 tahun 1999 juga diatur tentang penyelesaian sengketa yang mengutamakan proses non-litigas. Hal tersebut

²⁶ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut:

Sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.²⁷

Dari pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa penyelesaian sengketa akan didasari oleh itikad baik sehingga dalam hal ini akan mengutamakan proses musyawarah dan tidak mengutamakan proses litigasi di Pengadilan Negeri.

Pelayanan yang dapat diberikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) adalah sebagai berikut:

(1) Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan mendatangkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan.

(2) Arbitrase

²⁷ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase merupakan suatu cara menyelesaikan suatu sengketa perdata di luar peradilan yang dalam menyelesaikan suatu sengketa tersebut didasarkan pada suatu perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak-pihak yang bersengketa.

(3) Ajudikasi

Ajudikasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul diantara pihak yang bersengketa. Perbedaan ajudikasi dengan arbitrase terletak pada hal pihak yang diikat oleh putusan ajudikasi tersebut. Putusan ajudikasi akan mengikat Lembaga Jasa Keuangan sehingga apabila konsumen akan menyetujui putusan tersebut maka putusan tersebut akan dilaksanakan walaupun di lain pihak Lembaga Jasa Keuangan tidak menyetujui hal tersebut.

Pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sangat memberikan manfaat baik bagi beberapa pihak yang terkait. Manfaat tersebut berdampak bagi:

(1) Bagi Konsumen

Keuntungan yang didapat oleh konsumen dalam menyelesaikan sengketanya dengan melibatkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah LAPS akan menyelesaikan permasalahan konsumen dengan prinsip mudah, murah dan cepat.

(2) Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa akan menyelesaikan sengketa secara profesional sehingga kepercayaan konsumen terhadap produk serta layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan meningkat.

(3) Bagi Regulator

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa akan memberikan masukan-masukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan terkait saran untuk melakukan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan baik untuk bisnis Pelaku Usaha Jasa Keuangan maupun untuk memberikan perlindungan bagi konsumen serta masyarakat.

ii. Tindakan Lain

Tindakan Lain yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum represif dengan jalur non-litigasi oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006 dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 adalah sebagai berikut:

(1) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006

Perlindungan represif yang merupakan pemberian sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum kepada Perusahaan Pembiayaan pada saat terjadinya permasalahan hukum. Perlindungan represif yang terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006, adalah sebagai berikut:

a) Memberikan peringatan tertulis

Menteri Keuangan akan memberikan peringatan tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan yang didapati tidak menaati ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan

Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006 yang menyatakan:

Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 30 (tiga puluh) hari.²⁸

Dalam memberikan peringatan, Menteri keuangan akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut. Surat peringatan tertulis tersebut masing-masing mempunyai masa berlaku yaitu selama 30 (tiga puluh) hari sehingga Perusahaan Pembiayaan akan diberikan waktu selama 90 (sembilan puluh) hari untuk dapat melakukan suatu tindakan sehingga dapat memperbaiki kesalahannya.

b) Membekukan kegiatan usaha

Menteri Keuangan akan melakukan pembekuan terhadap kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan apabila masa berlaku dari peringatan tertulis yang sebelumnya telah diberikan telah berakhir. Pembekuan kegiatan usaha tersebut tertera dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan

²⁸ Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006 yang menyatakan:

Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan Perusahaan Pembiayaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Menteri menetapkan sanksi pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.²⁹

Dari ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa apabila Perusahaan Pembiayaan tersebut tidak melakukan tindakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut hingga masa berlaku peringatan tertulis telah habis, maka Menteri Keuangan akan melakukan pembekuan kegiatan usaha dari Perusahaan Pembiayaan tersebut sehingga Perusahaan Pembiayaan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatannya selama waktu yang ditentukan. Dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menyatakan bahwa pembekuan kegiatan usaha tersebut akan diberikan secara tertulis oleh Menteri Keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan keterangan

²⁹ Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

pembekuan kegiatan usaha tersebut akan berlaku sejak surat pembekuan ditetapkan. Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan berbunyi sebagai berikut:

Pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan mulai berlaku sejak surat pembekuan ditetapkan.³⁰

Ketika dalam masa pembekuan kegiatan usaha, Perusahaan Pembiayaan dilarang untuk melakukan kontrak pembiayaan yang baru dengan segala pihak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 44 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan:

Perusahaan Pembiayaan yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kontrak pembiayaan baru.³¹

Dari ketentuan tersebut maka Perusahaan Pembiayaan tidak dapat melakukan pembuatan kontrak pembiayaan yang baru dengan pihak lain sehingga Perusahaan Pembiayaan benar-benar

³⁰ Pasal 44 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

³¹ Pasal 44 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

tidak dapat melakukan kegiatan usahanya hingga Perusahaan Pembiayaan tersebut menaati ketentuan yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan.

(2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Pihak Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan sanksi administratif kepada pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan apabila melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sanksi administratif tersebut tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu³² :

- 1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Pemberian sanksi administratif oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

³² Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

dapat dilakukan dengan atau tanpa peringatan tertulis terlebih dahulu. Pengenaan denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, serta pencabutan izin kegiatan usaha dapat langsung diberikan kepada pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan tanpa adanya peringatan tertulis terlebih dahulu oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal pengenaan denda, pihak Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan denda secara tersendiri maupun dapat dikenakan secara bersama-sama dengan sanksi yang lainnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin kegiatan usaha. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut³³ :

- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan

³³ Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- 3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d atau huruf e.

Ketentuan besaran sanksi denda yang dikenakan kepada pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam sanksi administratif berupa denda yang telah berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 53 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut:

- 4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.³⁴

Ketentuan sanksi yang diberikan pihak Otoritas Jasa Keuangan kepada pihak Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah jelas tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

³⁴ Pasal 53 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kuangan sehingga pihak Otoritas Jasa Keuangan pun juga memiliki kewenangan untuk mengumumkan kepada masyarakat luas tentang pengenaan sanksi administratif pada suatu Pelaku Usaha Jasa Keuangan sehingga masyarakat dan calon Konsumen dapat mengentahui dan berhati-hati pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah dikenai sanksi oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

b. Perlindungan Hukum Represif Kepada Konsumen Melalui Jalur Litigasi

Jalur Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan dimana dalam proses penyelesaian sengketa tersebut sepenuhnya diserahkan pada pihak pengadilan. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 yaitu proses peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan. Selain itu kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya juga menjadi dasar dalam proses penegakkan hukum tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.³⁵

³⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemandirian hakim dalam mengadili suatu perkara, diharapkan juga hakim mengadili secara objektif dimana tidak ada pihak lain yang campur tangan dalam hakim mengadili dan memutuskan suatu sengketa. Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 yang menyatakan sebagai berikut:

Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.³⁶

Mengajukan suatu sengketa merupakan hak setiap warga negara Indonesia tanpa ada pengecualian, hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 4 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, yaitu sebagai berikut³⁷:

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Disamping pihak pengadilan tidakizinkan untuk membeda-bedakan orang dalam membantu mengatasi segala hambatan untuk tercapainya suatu keadilan, pihak pengadilan juga dilarang untuk menolak setiap perkara yang telah diajukan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang tentang

³⁶ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan sebagai berikut:

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya³⁸

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengadilan dilarang menolak segala jenis perkara yang sudah diajukan ke pengadilan dan tidak diperkenankan untuk menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas.

Ketika pihak konsumen sudah melewati proses non-litigasi namun masih belum mendapatkan suatu kesepakatan, maka pihak konsumen mempunyai hak untuk mengajukan sengketa yang konsumen alami dengan pihak PT Dharmatama Megah Finance ke proses pengadilan. Ketika pihak konsumen sudah mengajukan pada tahap litigasi maka seluruh pertimbangan dan putusan akan diserahkan sepenuhnya pada hakim. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa jalur litigasi merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa oleh para pihak yang terkait.

³⁸ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tabel 6.

**Aturan-Aturan Perlindungan Represif yang Belum dan Sudah Diatur Dalam
POJK Nomor 29/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan
Pembiayaan**

Aturan-Aturan yang Sudah Diatur	Aturan-Aturan yang Belum Diatur
<p>Aturan-aturan perlindungan represif belum diatur secara mendetail di dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan.</p>	<p>a. Perlindungan hukum represif yang melindungi konsumen melalui jalur non-litigasi, yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memfasilitasi Penyelesaian Pengaduan melalui Penanganan Pengaduan Tahap 1 (satu) dan Penanganan Tahap 2 (dua). 2) Menyelesaikan sengketa melalui LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) 3) Menyelesaikan sengketa dengan melakukan tindakan lain misalnya dengan memberikan peringatan tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, membatasi kegiatan usaha, membekukan kegiatan usaha dan mencabut izin kegiatan usaha. <p>b. Perlindungan hukum represif yang melindungi konsumen melalui jalur litigasi.</p>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Permasalahan hukum yang terjadi pada PT Dharmatama Megah Finance dengan pihak konsumen maupun pihak Bank X merupakan permasalahan hukum yang belum diatur secara spesifik tentang perlindungan hukumnya terlebih untuk perlindungan hukum kepada konsumen PT Dharmatama Megah Finance tersebut.

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif terdapat di beberapa peraturan dan perjanjian yang ada, antara lain:

- a) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999
- b) Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006
- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
- d) Perjanjian Channeling antara PT Dharmatama Megah Finance dengan pihak Bank X
- e) Perjanjian Pembiayaan antara PT Dharmatama Megah Finance dengan Konsumen

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif yang diberikan kepada konsumen dapat melalui jalur non-litigasi dan jalur litigasi. Berikut merupakan penjelasan dari kedua jalur tersebut:

a) Jalur Non-Litigasi

Tindakan yang dapat diambil pada jalur non-litigasi adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan kepada konsumen dengan dua tahap yaitu Penanganan Pengaduan Tahap 1 (satu) atau yang dikenal dengan *Internal Dispute Resolution (IDR)* dan Penanganan Pengaduan Tahap 2 (dua) atau yang dikenal dengan *External Dispute Resolution*.
- 2) Memberikan tindakan lain berupa peringatan tertulis, membekukan kegiatan usaha dan mencabut izin kegiatan usaha. Tindakan lain yang dilakukan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013.

b) Jalur Litigasi

Jalur Litigasi tersebut merupakan upaya penyelesaian sengketa yang terakhir diambil apabila tidak mendapatkan

kesepakatan pada menempuh jalur non-litigasi. Proses litigasi ini merupakan proses penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan dimana proses penyelesaian sengketa tersebut diserahkan kepada pihak pengadilan.

Dari kedua bentuk perlindungan hukum kepada konsumen, maka aturan-aturan yang belum diatur di dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif yang belum diatur:

- a) Pelaksanaan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan.
- b) Pengadaan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan.
- c) Memberikan penjelasan dan edukasi kepada konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan untuk meningkatkan literasi keuangan.
- d) Melarang adanya tindakan mengalihkan hak dan melakukan persetujuan pelunasan kepada pihak di luar perjanjian agar konsumen mendapatkan kejelasan dalam melakukan kewajibannya.
- e) Pemberian tanda bukti yang sah sebagai bukti kepada konsumen bahwa konsumen telah melunasi suatu pembayaran.

2. Perlindungan hukum represif yang belum diatur:

- a) Perlindungan hukum represif yang melindungi konsumen melalui jalur non-litigasi, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Memfasilitasi Penyelesaian Pengaduan melalui Penanganan Pengaduan Tahap 1 (satu) dan Penanganan Tahap 2 (dua).

- 2) Menyelesaikan sengketa melalui LAPS (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa)
- 3) Menyelesaikan sengketa dengan melakukan tindakan lain misalnya dengan memberikan peringatan tertulis kepada Perusahaan Pembiayaan, membatasi kegiatan usaha, membekukan kegiatan usaha dan mencabut izin kegiatan usaha.

b) Perlindungan hukum represif yang melindungi konsumen melalui jalur litigasi.

B. Saran

Solusi hukum atau saran-saran yang dapat diberikan Penulis adalah sebagai berikut:

1. Membuat suatu perjanjian dengan mencantumkan identitas ketiga pihak, yaitu pihak Konsumen, pihak PT Dharmatama Megah Finance serta pihak Bank X yang memuat adanya perjanjian channeling antara PT Dharmatama Megah Finance dengan Bank X

Perjanjian yang dibuat oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance, pihak Konsumen dan pihak Bank X merupakan perjanjian yang terpisah, dimana masing-masing pihak tidak saling mengetahui pihak-pihak mana saja yang bersangkutan di dalam perjanjian tersebut. Pihak Konsumen hanya mengetahui bahwa dirinya hanya mengikatkan diri kepada pihak PT Dharmatama Megah Finance sehingga hal tersebut menyebabkan pihak Konsumen tidak mengetahui bahwa sebenarnya sumber dana yang diperoleh PT Dharmatama Megah Finance berasal dari fasilitas

channeling yang diperjanjikan oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance dengan pihak Bank X.

Dari permasalahan hukum yang terjadi, maka dengan adanya perjanjian yang memuat identitas ketiga pihak tersebut, yaitu pihak konsumen, pihak PT Dharmatama Megah Finance dan pihak Bank X yang masing-masing pihak dapat mengetahui secara jelas siapa saja pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian tersebut serta risiko-risiko yang terjadi terhadap masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu.

Ketika terjadi kemacetan atau sesuatu hal yang buruk, maka pihak Bank X dapat menyelidiki dengan pasti pihak-pihak yang tidak melakukan pembayaran atau melanggar peraturan-peraturan yang telah disepakati sehingga pihak Bank X tidak salah mengambil tindakan dan tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan yang menyebabkan pihak konsumen dinyatakan macet oleh SLIK (Sistem Informasi Layanan Keuangan) yang berakibat pada penghapusan (*blacklist*) nama baik konsumen dan dapat menyebabkan kerugian pada pihak konsumen tersebut. Dengan adanya perjanjian tripartit tersebut, logikanya masing-masing pihak dapat melakukan hal sebagai berikut:

- 1) Mengetahui secara jelas siapa saja yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Pihak Konsumen, Pihak PT Dharmatama Megah Finance dan Pihak Bank X dapat mengetahui satu dengan yang lain dan tidak hanya sebatas perjanjian dua pelah pihak yang hanya diketahui oleh Pihak Konsumen dengan Pihak PT Dharmatama

Megah Finance saja. Pihak Konsumen pun juga harus mengetahui bahwa sebenarnya PT Dharmatama Megah Finance tersebut telah mengikatkan diri dalam Perjanjian *Channeling* sehingga ketiga pihak tersebut secara jelas mengetahui dan mengerti peran dari masing-masing pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut.

2) Melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.

Pihak Bank X selaku pemberi fasilitas *channeling* tersebut juga harus melakukan penyelidikan pada saat terjadi kemacetan atau hal buruk yang terjadi. Penyelidikan tersebut dilakukan agar tidak adanya kesalahan dalam pelaporan dan merugikan pihak Konsumen yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Pihak Konsumen tersebut dapat dikatakan secara rutin melakukan kewajibannya serta sudah dinyatakan lunas kepada PT Dharmatama Megah Finance harus menanggung konsekuensi dari kesalahan yang dibuat oleh PT Dharmatama Megah Finance yaitu PT Dharmatam Megah Finance tidak melakukan kewajibannya kepada pihak Bank X. Dari situlah Bank X dapat melakukan penyelidikan terhadap pihak yang secara nyata dan terbukti tidak melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat sehingga pihak yang melakukan kesalahan tersebut mendapatkan sanksi atau konsekuensi dari kesalahannya tersebut.

2. Adanya penyerahan objek jaminan milik PT Dharmatama Megah Finance kepada pihak Bank X.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak PT Dharmatama Megah Finance dengan pihak Bank X menyatakan bahwa PT Dharmatama Megah Finance hanya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan jaminan milik konsumennya. Hal tersebut tercantum dalam perjanjian kredit kedua belah pihak ini. Sesuai yang telah diperjanjikan, maka pihak PT Dharmatama Megah Finance tidak mempunyai kewajiban untuk menyerahkan jaminan milik PT Dharmatama Megah Finance itu sendiri. Mengingat pihak PT Dharmatama Megah Finance hanya merupakan agen fasilitas yang diberikan wewenang untuk meneruskan segala apapun yang diperlukan pihak Bank X kepada pihak Bank itu sendiri. Berikut merupakan potongan pasal Perjanjian *Channeling* yang menginsyarkan PT Dharmatama Megah Finance memberikan dokumen-dokumen milik debitur

Hal tersebut cukup riskan apabila terjadi permasalahan hukum seperti yang dialami oleh PT Dharmatama Megah Finance ini. Dimana pihak Konsumen telah melakukan pelunasan kepada pihak PT Dharmatama Megah Finance namun pihak PT Dharmatama Megah Finance tidak melakukan kewajibannya yang telah diperjanjikan dengan pihak Bank X.

Untuk mengatasi kondisi seperti ini adalah dengan menambahkan isi perjanjian yang menginstrumenkan pihak PT Dharmatama Megah Finance menyerahkan jaminan milik PT Dharmatama Megah Finance itu sendiri sehingga ketika pihak konsumen telah menyelesaikan kewajibannya atau telah melakukan pelunasan, pihak Bank X dapat

langsung memberikan BPKB milik konsumen tersebut kepada pihak konsumen itu sendiri. Sedangkan pihak Bank X dapat menahan jaminan milik PT Dharmatama Megah Finance itu sendiri hingga terdapat penyelesaian hukum di antara kedua belah pihak tanpa merugikan pihak Konsumen yang mempunyai itikad baik dalam memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya.

3. Merevisi isi dari Pasal-Pasal yang berkaitan dengan pengaturan *channeling* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dinilai kurang mendetail dalam mengatur tentang *channeling* tersebut sehingga masih ada kesalahan penafsiran hingga tidak adanya klausul-klausul yang mengatur tentang beberapa hal sehingga para pihak-pihak yang menggunakan kerjasama *channeling* tersebut seringkali dapat menimbulkan permasalahan hukum yang cukup serius. Melakukan revisi terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan merupakan solusi hukum yang cukup kuat dan terdapat kejelasan hukum agar terdapat peraturan hukum yang tertulis dan dapat mengikat para pihak. Revisi tersebut antara lain adalah :

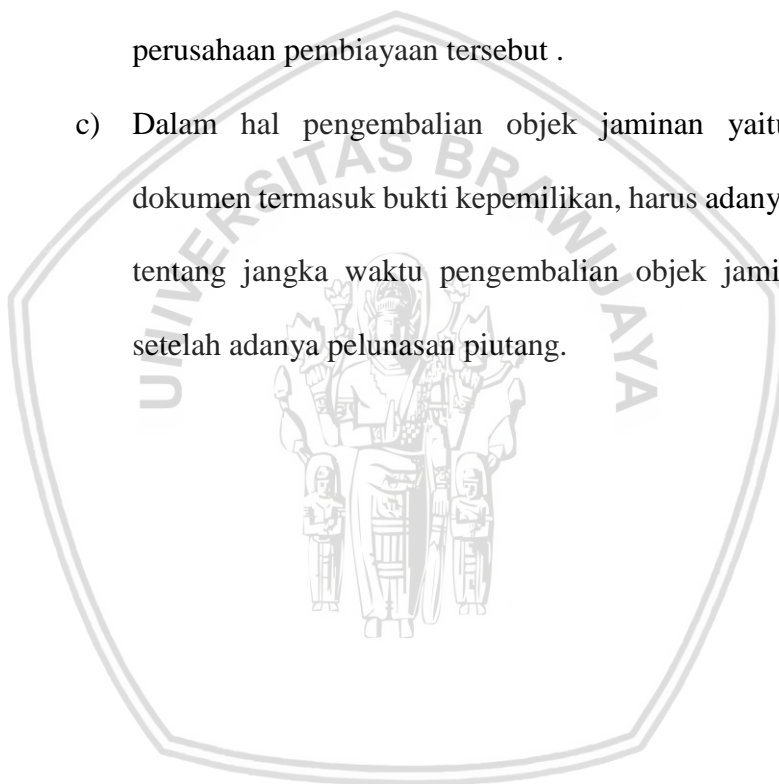
- 1) Penjelasan secara detail tentang kerja sama pembiayaan.

Kerja sama pembiayaan yang telah dicantumkan dalam pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menjelaskan tentang *channeling* secara umum dan segala risiko yang terjadi berada di pihak yang memberi dana. Revisi yang dapat dilakukan adalah dengan:

- a) Menambahkan penjelasan secara detail prosedur dari kerja sama *channeling* sehingga adanya kejelasan untuk dapat melakukan kerja sama *channeling* tersebut dan segala persyaratan untuk dapat melakukan kerja sama tersebut.
 - b) Mengatur tentang larangan untuk melakukan kerja sama pembiayaan tersebut dengan pihak-pihak lain pada Perusahaan Pembiayaan dengan mensyaratkan Perusahaan pembiayaan tersebut menanggung sebagian atau seluruh risiko pembiayaan.
- 2) Mengatur tentang pemeliharaan terhadap objek-objek jaminan pembiayaan dan prosedur pengembalian bukti kepemilikan yang menjadi objek jaminan, antara lain tentang:
- a) Penyerahan objek jaminan merupakan syarat untuk dapat melakukan kerja sama *channeling* sehingga terdapat proses penyerahan dokumen-dokumen milik konsumen yang diserahkan kepada perusahaan pembiayaan. Ketika Perusahaan Pembiayaan menerima dokumen-dokumen tersebut maka Perusahaan Pembiayaan dapat menyimpan dokumen-dokumen tersebut pada Kantor Pusat dari Perusahaan Pembiayaan

tersebut hingga perjanjiannya berakhir. Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen-dokumen milik konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan juga harus memiliki pedoman yang tertulis dalam melakukan hal tersebut.

- b) Mengatur tentang pelarangan perusahaan pembiayaan untuk menjaminkan fisik dari bukti kepemilikan atas objek jaminan kepada pihak lain yang memberikan pinjaman kepada perusahaan pembiayaan tersebut .
- c) Dalam hal pengembalian objek jaminan yaitu dokumen-dokumen termasuk bukti kepemilikan, harus adanya pengaturan tentang jangka waktu pengembalian objek jaminan tersebut setelah adanya pelunasan piutang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- , 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)*, Surabaya: Perdaban
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Johan Nasution, Bander. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- , 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Satrio, J. 1986. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2002. *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret

Soedewi, Sri. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.

-----, 1977. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di Dalam Praktik dan Pelaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Windari, Ratna Artha. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

JURNAL HUKUM

Hendera, **Perlindungan Hukum Terhadap Bank Bila Terjadi Kredit Macet Oleh Debitor Penanam Modal Asing**, Arena Hukum, Volume 10, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2017.

Ketut Dezy Ari Utami, **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Berdasarkan Jual Beli di Bawah Tangan (Kajian Terhadap Putusan Nomor : 1860K/Pdt/2005)**, Arena Hukum, Volume 13, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

INTERNET

Praskoabdullah, **Definisi Perlindungan Hukum** (*online*),

<http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum/>, (31

Januari 2018 pukul 15.10), 2011.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2017 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.